

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**RENSTRA**

**( RENCANA STRATEGIS )**

TAHUN 2021-2026

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian didalam mencapai tujuan organisasi, Amin.

Benteng, 15 Agustus 2023

|  |
| --- |
| **KEPALA DINAS** |
|  |
|  |
|  |
| **ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si** |
| Pangkat : Pembina Utama Muda |
| NIP. 19670526 199703 1 005 |

**DAFTAR ISI**

**SAMPUL**

**KATA PENGANTAR**  i

**DAFTAR ISI** ii

**DAFTAR TABEL** iii

**DAFTAR GAMBAR** vi

**BAB. I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

**BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Disdagkukm 13

2.2. Sumber Daya Disdagkukm 27

2.3 Kinerja Pelayanan Disdagkukm 29

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdagkukm 66

**BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Disperindag KUKM 68

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 70

3.3. Telaahan RENSTRA K/L DAN RENSTRA 78

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Disperindag KUKM Strategis 89

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 98

**BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan Jangka Menengah Disperindag KUKM 103

4.2. Sasaran Jangka Menengah Disperindag KUKM 104

**BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi Disdag KUKM 111

5.2. Arah Kebijakan Disperindag KUKM 115

**BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Rencana Program 122

6.2. Kelompok Sasaran 126

6.3. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 126

**BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  230

**BAB. VIII P ENUTUP**  233

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 28

Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Diklat/Penjenjangan 28

Tabel 3. Sarana Dan Prasarana 28

Tabel 4. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 - 2020

Kabupaten Kepulauan Selayar 33

Tabel 5. Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 – 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar 33

Tabel 6. Persentase Ukm Non Bpr/Lkm Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 37

Tabel 7. Persentase Bpr/Lkm Aktif Menurut Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 37

Tabel 8. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil Menurut Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 38

Tabel 9. Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2017 39

Tabel 10. Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2018 39

Tabel 11. Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2019 40

Tabel 12. Jenis komoditi asal Selayar yang telah dikirim ke Surabaya 43

Tabel 13. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 44

Tabel 14. Persentase Peningkatan PAD Disdag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar 45

Tabel 17. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 46

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 49

Tabel 19. Identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 68

Tabel 20. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Disdag KUKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar 73

Tabel 21. Permasalahan Pelayanan Dinas erdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 79

Tabel 23. Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 87

Tabel 24. Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 89

Tabel 25. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 97

Tabel 26. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis 100

Tabel 27. Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Perindag KUKM

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 104

Tabel 28. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Disdag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 105

Tabel 29. Indikator sasaran OPD Perindag KUKM dan target kinerja sasaran OPD Perindag KUKM Sebelum Perubahan 106

Tabel 30. Perubahan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 109

Tabel 31. Analisis SWOT 112

Tabel 32. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 Sebelum Perubahan 116

Tabel.33. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 Setelah Perubahan 118

Tabel 34. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 127

Tabel 35 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ( Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021) 165

Tabel 36 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ( Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15-1317 ) 188

Tabel 37 Program Dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebelum Perubahan) 226

Tabel 38 Program Dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar (Setelah Perubahan) 228

Tabel 39 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 230

Tabel 40 Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten

Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 231

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindag Kukm Tahun 2021-2026 43

Gambar 2. Grafik Pegawai Dinas Perindag Kukm Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Golongan Ruang 44

Gambar 3. Gambar Diagram Capaian Program Prioritas 50

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi. peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Renstra Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi untuk jangka waktu 5 tahun. Pelaksanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik aspek pendapatan, kesempatan kerja, danlapangan berusaha dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Daerah maka perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah agar pelaksanaanya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Potensi sumber daya alam diperlukan pembinaan guna meningkatkan nilai tambah, efesiensi dan produktifitas pengelolaan berbagai komoditi yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik dipasar regional, nasional, dan global.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai yang mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi diwilayah Kabupaten Kepulauan selayar melalui pemberdayaan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi rill yang dapat tumbuh dan berkembang serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya para pelaku ekonomi

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Seluruh Dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah Sistem Perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renstra OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra K/L Dinas Induk Provinsi dan mengacu pada rancangan awal RPJMD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renstra OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renstra OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPJMD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk lima tahun.
   1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45);
17. Peraturan Pemeri ntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi,Validasi dan Inventasrisasi Pemutakhiran Klasfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Selayar nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
43. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
    1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring serta evaluasi capaian program/kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, meliputi :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
2. Untuk sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan Dinas Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu Tahun 2021-2026;

2. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beserta seluruh unit kerjanya;

3. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

4. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam perangkat Daerah

* 1. **Sistematika Penulisan**

Rancangan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Yang memuat uraian latar belakang wajibnya disusun Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta garis besar sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Yang memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, yang dilengkapi dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Yang memuat identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan lima tahun mendatang.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pencapaian visi dan Misi yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Memuat rencana program dan kegiatan yang dipilih beserta perencanaan pendanaan dari setiap program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan kelompok sasaran.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penetapan indikator kinerja DISDAG KUKM untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian program kegiatan.

BAB. VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

* 1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ; dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan bidang erdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

* + 1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

**Fungsi:**

1. perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi :**

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman Pelaksana tugas:
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
7. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemrintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    * 1. **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta teknis ketatausahaan kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

**Fungsi :**

* 1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
  2. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
  3. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
  4. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

**Uraian Tugas Sekeretaris, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. melakasanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    * + 1. **Subbagian Program**

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tigas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;
7. memfasilitasi penyusunan Renstra dan Rencana Kerja perangkat Daerah;
8. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
9. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
11. menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah;
12. memfasilitasi penjaringan inovasi daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
13. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
    * + 1. **Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian pengelolaan perundang-undangan

**Uraian Tugas :**

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian umum, kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
8. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
9. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
10. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
11. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
12. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
13. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
14. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
15. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
16. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
19. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga emerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
20. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian umum, kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
22. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    * + 1. **Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbangian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
8. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
10. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
11. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
12. menyusun laporan *Prognosis* Realisasi Anggaran
13. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada piminan sebagai bahan perumusan kebijakan
17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya;
    * 1. **Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perdagangan.

**Fungsi :**

* 1. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
  4. pelaksanaan administrasi di bidang perdagangan; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan/pengembangan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi;
7. melaksanakan peningkatan dan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
8. melaksanakan mitra kerja dengan instansi terkait/Dinas lainnya serta organisasi/asosiasi dunia usaha di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
9. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pedagang atas kegiatan penggunaan produk dalam negeri dan pendistribusiannya;
10. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pengadaan dan penyaluran barang dan jasa di bidang perdagangan;
11. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perdagangan;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksaan tugas dan fungsi;
14. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perdagangan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    * 1. **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Uraian tugas, meliputi :**

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
7. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
8. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
9. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
10. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil

dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;

1. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum dalam di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
2. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
3. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kelembagaan.
5. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skala usaha dan pengawasan;
6. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
7. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendaliadan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    * 1. **Jabatan Fungsional.**

Jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan jabatan fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GAMBAR 2.1. STRUKTUR ORNAGISASI DINAS PERINDAG KUKM TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**SEKRETARIS**

**SUB BAGIAN**

**KEUANGAN**

**SUB BAGIAN**

**UMUM KEPEGAWAIAN**

**SUB BAGIAN**

**PROGRAM**

**BIDANG**

**PERPERDAGANGAN**

**BIDANG**

**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**UPTD**

*( Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023)*

* 1. **Sumber Daya** **Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung dengan keberadaan SDM dan Aset/Modal yang ada.

* + 1. **Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 didukung oleh 74 (Tujuh Puluh Empat) orang Pegawai, terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 46 (empat puluh enam) orang Pekerja Harian Lepas (PHL). Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.2.1.1 untuk data pegawai berdasar golongan, Tabel 2.2.1.2 data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Tabel 2.2.1.3 data pegawai berdasarkan diklat/penjenjangan :

Gambar 2.2.1.1

Grafik Pegawai Disdag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.2.1.2

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | PNS PHL | | Jumlah |
| 1 | S2 | 8 Org | - | 5 Org |
| 2 | S1/D4 | 14 Org | 20 Org | 34 Org |
| 3 | D.III | 1 Org |  | 1 Org |
| 4 | D II |  | 3 Org | 3 Org |
| 5 | SMA | 8 Org | 23 Org | 31 Org |
|  | **Total** | **28 Org** | **46 Org** | **74 Org** |

Tabel 2.2.1.3

Data Pegawai Berdasarkan Diklat/Penjenjangan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Dinas/Bidang/Seksi | Diklat / Penjenjangan  II III IV | | | Jumlah |
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org | - | - | 1 Org |
| 2 | Sekretaris | - | 1 Org | 1 Org | 2 Org |
| 3 | Perindustrian | - | 1 Org | 3 Org | 4 Org |
| 4 | Perdagangan | - | 1 Org | 3 Org | 4 Org |
| 5 | Koperasi | - | 1 Org | 1 Org | 2 Org |
| 6 | Usaha Kecil Menengah | - | 1 Org | 3 Org | 4 Org |
| 7 | Kemetrologian | - | 1 Org | 3 Org | 4 Org |
|  | **Total** | **1 Org** | **6 Org** | **14 Org** | **21 Org** |

* + 1. **Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember 2023 sebagaimana Tabel 2.2.2.1 berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Saran dan Prasarana** | **Jumlah** | **Ket** |
| 1 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 Unit | Baik |
| 2 | Sepeda Motor | 32 Unit | Baik |
| 3 | Meja Pos Ukur Ulang | 1 Unit | Baik |
| 4 | Bejana Ukur Standar | 1 Unit | Baik |
| 5 | Alat Uji Meteran Kerja 1 m/ 1 mm | 1 Unit | Baik |
| 6 | Alat Uji Takaran | 1 Unit | Baik |
| 7 | Alat Uji Pompa Ukur BBM | 4 Unit | Baik |
| 8 | Alat Uji Timbangan Elektronik | 3 Unit | Baik |
| 9 | Anak Timbangan | 12 Unit | Baik |
| 10 | Alat Uji Dancin Logam | 1 Unit | Baik |
| 11 | Anak Timbangan (Bidur) Kelas M2 | 25 Unit | Baik |
| 12 | Termometer Digital | 1 Unit | Baik |
| 13 | Anak Timbangan Remidi Kelas M2 | 1 Unit | Baik |
| 14 | Anak Timbangan Miligram Massa | 1 Unit | Baik |
| 15 | Meja Sidang Tera/Tera Ulang | 4 Unit | Baik |
| 16 | Tool Set Sidang | 2 Unit | Baik |
| 17 | Tang Segel | 4 Unit | Baik |
| 18 | Landasan Cap Tanda Tera | 2 Unit | Baik |
| 19 | Thermohygrometer | 1 Unit | Baik |
| 20 | Salib Sumbu | 1 Unit | Baik |
| 21 | Tongkat Duga | 2 Unit | Baik |
| 22 | Timbangan Ukur Ulang /Pos Ukur Ulang | 1 Unit | Baik |
| 23 | Gelas Ukur Kapitas 1 Liter Daya Baca 100 ml | 2 Unit | Baik |
| 24 | Dehumidifier | 1 Unit | Baik |
| 25 | Power Roll Cable 50 Meter | 2 Unit | Baik |
| 26 | AC | 17 Unit | Baik |
| 27 | Televisi | 7 Unit | Baik |
| 28 | Mesin Scanning Dokumen | 1 Unit | Baik |
| 29 | Absensi Sidik Jari | 1 Unit | Baik |
| 30 | Running Text | 2 Unit | Baik |
| 31 | Kulkas | 2 Unit | Baik |
| 32 | Kamera | 7 Unit | Baik |
| 33 | Lemari | 16 Unit | Baik |
| 34 | Speaker | 1 Unit | Baik |
| 35 | Gorden | 1 Paket | Baik |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sarana dan Prasarana** | **Jumlah** | **Ket** |
| 36 | Kursi Rapat | 100 Unit | Baik |
| 37 | Kursi Kerja | 39 Unit | Baik |
| 38 | Kursi Tamu | 3 Unit | Baik |
| 39 | Meja Kerja | 37 Unit | Baik |
| 40 | Laptop | 35 Unit | Baik |
| 41 | Printer | 14 Unit | Baik |
| 42 | Wireless Access Point | 1 Unit | Baik |
| 43 | Komputer PC | 10 Unit | Baik |
| 44 | Note Book | 8 Unit | Baik |
| 45 | UPS | 1 Unit | Baik |
| 46 | Proyektor | 4 Unit | Baik |
| 47 | Facsimile | 1 Unit | Baik |

* 1. **Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Indikator urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua layanan urusan yaitu :

1. Layanan Urusan Wajib Non Dasar :
2. Persentase koperasi aktif
3. Persentase UKM non BPR/LKM aktif
4. Persentase BPR/LKM aktif
5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil
6. Layanan Urusan Pilihan :
7. Ekspor Bersih Perdagangan
8. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci, Outcome dan Output urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

**Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar :**

1. Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
2. Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
3. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
4. Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
6. Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
13. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala kecil
14. Persentase jumlah usaha kecil yang diimput ke dalam system online data system (ODS)
15. Persentase jumah usaha kecil yang bermitra
16. Persentase jumah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
17. Persentase jumah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha

**Urusan Pilihan :**

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh falisitas promosi dagang
2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh falisitas pengembangan produk
3. Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor
4. Persentase pelaku usaha yang menjadi ekportir baru
5. Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor
6. Jumlah penanganan pengaduan konsumen
7. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi
8. Jumlah komoditi potensial yang dipantau
9. Indeks kinerja BPSMB
10. Persentase SIUP minuman beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan
11. Persentase rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang diterbitkan
12. Persentase SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan
13. Persentase penerbitan SIUP MB gol. B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat
14. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu
15. Jumlah barang beredar yag diawasi
16. Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda

Capaian Program Prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2015-2020 dapat diuraikan sebagai berikut

Gambar 2.3.1

**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

1. **Persentase Koperasi Aktif**
2. Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 136 koperasi dari 165 koperasi yang ada.
3. Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2020 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje’, Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
4. Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulaua Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 - 2020

Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** |
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 129 | 135 | 130 | 136 | 145 | 131 | 162 | 136 | |
| 2 | Jumlah koperasi | 178 | 184 | 186 | 189 | 189 | 161 | 81,48 | 165 | |
| 3 | Persentase koperasi aktif | 72,47 | 73,37 | 69,89 | 71,96 | 76,72 | 81,37 | 132 | 82,42 | |

Tabel 2.3.3

Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2020

Kabupaten Kepulauan Selayar

| **NO** | **Kecamatan** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecamatan Benteng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 45 | 48 | 43 | 48 | 57 | 44 | 44 | 47 |
|  | Jumlah koperasi | 79 | 82 | 84 | 86 | 86 | 63 | 63 | 65 |
|  | Persentase koperasi aktif | 56,96 | 58,54 | 57,14 | 55,81 | 66,28 | 69,84 | 69,84 | 72,30 |
| 2 | Kecamatan Bontoharu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
|  | Jumlah koperasi | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
|  | Persentase koperasi aktif | 80 | 81,82 | 81,82 | 83,33 | 83,33 | 90 | 90 | 90,90 |
| 3 | Kecamatan Bontomanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
|  | Jumlah koperasi | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 |
|  | Persentase koperasi aktif | 76,92 | 78,57 | 78,57 | 78,57 | 78,57 | 83,33 | 83,33 | 84,61 |
| 4 | Kecamatan Bontomatene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
|  | Jumlah koperasi | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Persentase koperasi aktif | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
| 5 | Kecamatan Buki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | Jumlah koperasi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
|  | Persentase koperasi aktif | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Kecamatan Bontosikuyu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 12 |
|  | Jumlah koperasi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 15 |
|  | Persentase koperasi aktif | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 80 | 81 | 80 |
| 7 | Kecamatan Pasimasunggu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Jumlah koperasi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Persentase koperasi aktif | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 8 | Kecamatan Pastim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Jumlah koperasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
|  | Persentase koperasi aktif | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  | Jumlah koperasi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  | Persentase koperasi aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Kecamatan Takabonerate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
|  | Jumlah koperasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
|  | Persentase koperasi aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Kecamatan Pasilambena |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Jumlah koperasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Persentase koperasi aktif | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
|  | Total Jumlah koperasi aktif | 129 | 135 | 130 | 136 | 145 | 131 | 132 | 136 |
|  | Total Jumlah koperasi | 178 | 184 | 186 | 189 | 189 | 161 | 162 | 165 |
|  | Total Persentase koperasi aktif | 72,47 | 73,37 | 69,89 | 71,96 | 76,72 | 81,37 | 81,48 | 82,42 |

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN
3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiat
5. **Persentase UKM non BPR/LKM aktif**

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19. Persentase UKM non BPR/LKM aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.4.

Tabel 2.3.4.

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Menurut Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** |  | **Kecamatan** | **Tahun** | | | | |
|  |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |
| 1 |  | Pasimarannu | n/a | 4,22 | 8,55 | 4,05 | 12,12 |
| 2 |  | Pasilambena | n/a | 0 | 0 | 12,22 | 8,58 |
| 3 |  | Pasimasunggu | n/a | 9,74 | 11,89 | 9,99 | 5,29 |
| 4 |  | Taka bonerate | n/a | 6,49 | 7,00 | 2,19 | 6,49 |
| 5 |  | Pasimasunggu Timur | n/a | 4,87 | 6,65 | 6,44 | 5,41 |
| 6 |  | Bontosikuyu | n/a | 27,92 | 23,29 | 49,09 | 10,75 |
| 7 |  | Bontoharu | n/a | 3,90 | 4,70 | 5,53 | 11,29 |
| 8 |  | Benteng | n/a | 1,30 | 2,10 | 1,36 | 12,17 |
| 9 |  | Bontomanai | n/a | 3,57 | 4,95 | 4,34 | 8,27 |
| 10 |  | Bontomatene | n/a | 34,74 | 26,59 | 8,51 | 10,24 |
| 11 |  | Buki | n/a | 3,25 | 4,30 | 4,54 | 9,39 |
| **Persentase UKM non**  **BPR/LKM Aktif** | | | **n/a** | **100** | **100** | **100** | **100** |

1. **Persentase BPR/LKM aktif**

Persentase BPR/LKM aktif juga sangat baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas BPR di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19. Persentase BPR/LKM aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.5.

Tabel 2.3.5

Persentase BPR/LKM Aktif Menurut Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | | **Tahun** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Pasimarannu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasilambena | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pasimasunggu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Taka bonerate | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bontosikuyu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bontoharu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benteng | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Bontomanai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | Bontomatene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | Buki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Persentase BPR/LKM Aktif** | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Persentase UMKM yang produktif**

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bidang pembinaan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang pembinaan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif pengerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Persentase usaha mikro dan kecil juga sangat baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemic Covid–19. Ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.6.

Tabel 2.3.6

Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** |  | **Kecamatan** | **Tahun** | | | | |
|  |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |
| 1 |  | Pasimarannu | n/a | 4,21 | 8,54 | 4,04 | 12,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pasilambena | n/a | 0 | 0 | 12,22 | 8,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pasimasunggu | n/a | 9,71 | 11,89 | 9,99 | 5,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Taka bonerate | n/a | 6,47 | 6,99 | 2,19 | 6,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pasimasunggu Timur | n/a | 4,85 | 6,64 | 6,44 | 5,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Bontosikuyu | n/a | 27,83 | 23,28 | 49,07 | 10,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Bontoharu | n/a | 3,88 | 4,70 | 5,53 | 11,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Benteng | n/a | 1,62 | 2,15 | 1,40 | 12,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Bontomanai | n/a | 3,56 | 4,95 | 4,33 | 8,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Bontomatene | n/a | 34,63 | 26,57 | 8,50 | 10,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Buki | n/a | 3,24 | 4,30 | 4,54 | 9,39 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Persentase Usaha Mikro dan Kecil** | | | **n/a** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Data Pelaku UKM yang produktif sampai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Database Pelaku UKM sebanyak 3.127 Orang
      2. Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2020 Sebanyak 403 Kelompok, Dengan Jumlah Unit Sebanyak 1.732 Unit Bantuan Peralatan.

Tabel 2.3.7

Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengadaan** | **Jumlah Kelompok** | **Jumlah Unit** |
| 1 | Pengadaan Peralatan Masak Memasak | 23 Kelompok | 427 Unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Spinner | 22 Kelompok | 73 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Penggiling Daging | 15 Kelompok | 30 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Pembuat Roti | 22 Kelompok | 20 Unit |
| 5 | Pengadaan Alat Kacip | 21 Kelompok | 96 Unit |
| **Jumlah** | | **103 Kelopok** | **217 Unit** |

Tabel 2.3.8

Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengadaan** | **Jumlah Kelompok** | **Jumlah Unit** |
| 1 | Pengadaan Parut Kelapa | 22 Kelompok | 67 Unit |
| 2 | Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan | 20 Kelompok | 60 Unit |
| 3 | Pengadaan Alat Pertukangan | 22 Kelompok | 22 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras | 37 Kelompok | 40 Unit |
| 5 | Pengadaan Oven Kue | 20 Kelompok | 20 Unit |
| 6 | Pengadaan Alat Vacum Pres | 32 Kelompok | 94 Unit |
| 7 | Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri | 11 Kelompok | 11 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin Pengering | 12 Kelompok | 12 Unit |
| 9 | Pengadaan Mesin Press Emping | 16 Kelompok | 16 Unit |
| 10 | Pengadaan Alat Kerajinan | 17 Kelompok | 272 Unit |
| **Jumlah** | | **209 Kelompok** | **614 Unit** |

Tabel 2.3.9

Daftar Bantuan Peralatan Tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengadaan** | **Jumlah Kelompok** | **Jumlah Unit** |
| 1 | Pengadaan Alat Perajang Keripik | 15 Kelompok | 105 Unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras | 12 Kelompok | 60 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah | 5 Kelompok | 5 Unit |
| 4 | Pengadaan Alat Pertukangan | 17 Kelompok | 119 Unit |
| 5 | Pengadaan Alat Masak Memasak | 25 Kelompok | 550 Unit |
| 6 | Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa | 5 Kelompok | 5 Unit |
| 7 | Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras | 11 Kelompok | 55 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah | 1 Kelompok | 2 Unit |
| **Jumlah** | | **91 Kelompok** | **901 Unit** |

kendala yang dihadapi sebagai berikut :

* Masih banyak pelaku ukm yg tidak dapat bantuan.
* Pendataan pelaku ukm yg berada di pulau sulit terdata.
* Biaya operasional pencairan tidak ada sementara banyak orang di kepulauan
* Kepala desa dan lurah kurang merespon untuk memfasilitasi warganya
* Masih banyak yag tidak memiliki identitas ( ktp )

Langkah yang ditempuh dalam menghadapi masalah tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan UKM terus melakukan program pembinaan dan pengembangan UKM. Berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan. Yaitu penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk UKM, peningkatan kemampuan sentra dan serta pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi.

UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar selayaknya mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebab di sini terdapat ribuan unit usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 550 orang. UKM secara signifikan telah banyak memberikan konstribusi kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

1. **Ekspor Bersih Perdagangan**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar belum dapat melaksanakan kegiatan ekspor mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar belum dapat menertbitkan sertifikat fumigasi – pembuatan Certificate of Origin (COO)/ SKA ekspor, mulai dari penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) sampain NPWP pemilik perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam sektor usaha perdagangan mengambil Arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah dengan Peningkatan Penataan Sistem Distribusi Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestic, oleh karena itu perlu strategi antara lain meningkatkan integrasi antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga dan meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan sehat dan pengamanan perdagangan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.

Adapun focus dan kegiatan prioritas bidang perdagangan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia;

2. Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan,

3. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

Prestasi dan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disektor perdagangan antara lain :

1 Beroperasinya kapal peti kemas tol laut yg merupakan subsidi pemerintah pusat dengan rute Makassar–Selayar–Jampea-Raha–Sikeli – Ereke PP yang memuat bahan pokok dan penting lainnya.

2. Modernisasi Pelabuhan Benteng Selayar untuk mendorong peningkatan

ekonomi di Kepulauan Selayar kerjasama Pemerintah Daerah dan PT. Pelindo IV yaitu Launching peti kemas tanggal 9 September 2020 dengan operator PT. Temas pertanda dimulainya kegiatan kontainerisasi yang mengangkut berbagai produk pertanian, perkebunan dan perikanan oleh KM. Semangat Mas dengan jadwal operasional 2 (dua) kali sebulan.

3. Terbangunnya 6 (enam) Unit Pasar Rakyat yang merupakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI yaitu :

a. Pasar Rakyat Barugaia Kecamatan Bontomanai Tahun 2019;

b. Pasar Rakyat Bonea Kecamatan Benteng Utara Tahun 2019;

c. Pasar Rakyat Padang Kecamatan Bontoharu Tahun 2019;

d. Pasar Rakyat Appatanah Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2019;

e. Pasar Rakyat Bontolempangan Kecamatan Buki Tahun 2019;

f. Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur Tahun 2020;

Dengan adanya angkutan peti kemas langsung dari Selayar ke Surabaya maka biaya untuk pengiriman barang dari Selayar ke Surabaya yang selama ini melalui Makassar otomatis lebih efektif dan lebih efisien terutama dari biaya angkut yang lebih murah maupun dari jangka waktu pengangkutannya yang lebih cepat.

Sejak beroperasinya angkutan peti kemas yang ditandai dengan louncing perdana pada tanggal 9 September 2020 telah dimanfaatkan oleh masyarakat Selayar utamanya para pelaku usaha komoditi hasil pertanian dan perikanan yang cukup membawa keuntungan dan harga komoditi mulai meningkat drastis terutama harga kopra yang harga sebelumnya cukup memprihatinkan masyarakat khususnya para petani.

Kegiatan pengiriman barang dari Selayar ke Surabaya sampai dengan saat ini telah melakukan kegiatan pemuatan sebanyak 216 Box dan kegiatan pemuatan dari Surabaya ke Selayar sebanyak 9 Box dengan jenis komoditi yang diangkut sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.3.10

Jenis komoditi asal Selayar yang telah dikirim ke Surabaya :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Komoditi** | **Satuan (container)** | **Rata - Rata (Rp.)** |
| 1 | Kopra | 63 |  |
| 2 | Kelapa Biji | 26 |  |
| 3 | Ikan | 3 |  |
| 4 | Cengkeh | 1 |  |
| 5 | Arang | 16 | Rp. 80.000 |
| 6 | Serbuk kayu | 1 |  |

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala adalah :

1. Akses pasar dan jaringan pemasaran masih perlu ditingkatkan;

2. Infrastruktur perdagangan masih perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah;

3. Kesadaran para produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;

4. Masih terbatasnya informasi harga pasar dan pengetahuan tentang teknis pemasaran;

5. Belum adanya kendaraan operasional yang mendukung tugas-tugas kemetrologian;

6. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan lembaga perlindungan konsumen;

7. Masih terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan konsumen;

8. Masih minimnya bagi para pelaku usaha yang mencamtumkan label informasi kualitas produknya;

9. Semua komoditi asal Selayar belum bisa berstatus ekspor asal selayar karena belum adanya Surat Keterangan Asal Barang yang bisa diterbitkan di Selayar;

10. Belum maksimalnya pengembangan Pasar Bonea dikarenakan sampai dengan saat ini pedagang pasar yang menempati Pasar Tempat Pelelangan Ikan belum berhasil direlokasi ke pasar Bonea;

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Perluasan jaringan pemasaran
3. Upaya perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTTP
4. Upaya peningkatan daya saing produk-produk yang dipromosikan
5. Sinergitas peraturan pusat dan daerah
6. **Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan pada 1.843 pedagang dari 31 pasar se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 18 dan meningkat menjadi 31 pada tahun 2020. Hal ini disebakan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pedagang/usaha informal yang ada di daerahnya. Cakupan bina kelompok pedagang usaha informal menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.11.

Tabel 2.3.11

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Menurut Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** |  | **Kecamatan** | **Tahun** | | | | |
|  |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |
| 1 |  | Pasimarannu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |  | Pasilambena | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 |  | Pasimasunggu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 |  | Taka bonerate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 |  | Pasimasunggu Timur | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 |  | Bontosikuyu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 |  | Bontoharu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  | Benteng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 |  | Bontomanai | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 10 |  | Bontomatene | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 |  | Buki | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| **Cakupan Bina Kelompok**  **Pedagang/Usaha Informal** | | | **28** | **28** | **30** | **32** | **31** |

Yang menjadi kendala selama ini meskipun kondisi Bangunan yang refresentatif sudah tersedia 80% namun pedagang aktif setiap hari beroperasi hanya pada pasar tradisional Kecamatan Benteng yang memiliki luas lahan 3.000 M2.

Perkembangan Pasar Tradisional Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menentu, karena sebagian pedagang berpindah-pindah ke pasar TPI. Pasar TPI tidak diperuntukkan sebagai pasar tetapi sebagai Tempat Pelelangan Ikan.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memperoleh beberapa penghargaan/prestasi, yaitu :  
 1. Dikukuhkannya Pasar Sentral Bonea pada tahun 2017 dan Pasar   
 Batangmata tahun 2018 sebagai Pasar Tertib Ukur dengan

menerima piagam penghargaan dari Dirjen Perlindungan

Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan.

2. Pengawasan peredaran barang dan jasa dilaksanakan secara

berkala dan telah dilakukan pemusnahan barang kadaluarsa

yang disaksikan oleh unsur MUSPIDA.

Tabel 2.3.12

Persentase Peningkatan PAD

Disperindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **%** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Retribusi Pasar | % | 21,15 | 24,43 | 26,51 | 28,32 | 29,52 | 31,81 |
| 2 | Tera/Tera Ulang | % | 32,47 | 36,72 | 40,66 | 45,92 | 48,59 | 51,51 |

Capaian kinerja Dinas Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020, dituangkan dalam Tabel 2.3.13 (T-C. 23) dan Tabel 2.3.14 (T-C. 24) sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel. 2.3.13 (T-C. 23)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kabupaten Kepulauan Selayar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| **No** | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | **Target NSPK** | | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | | **Target Renstra OPD Tahun ke-** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun ke-** | | | | | **Rasio Capaian Tahun ke-** | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Persentase koperasi aktif  Jumlah BPR  Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil  Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB  Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal  **Persentase kepatuhan Pelaku Usaha** | - | | **√**  **√**  **√**  **√**  **√**  **√** | **-** | | 93,34  1  16.087  n/a  85  n/a | 93,47  1  17.210  n/a  85  n/a | 94,34  1  18.242  n/a  85  n/a | 94,66  1  19.270  7,69  85  n/a | 94,90  1  20.304  7,81  85  n/a | 71,96  1  11.380  4,3  28  n/a | 76,72  1  15.016  7,46  28  n/a | 81,37  1  18.631  7,53  32  n/a | 81,48  1  20.020  7,69  30  100 | 82,42  1  4.102  7,81  31  **100** | | 61,58  100%  9.592  n/a  18,55  n/a | 66,34  100%  13.103  n/a  18,55  n/a | 77,88  100%  18.846  n/a  22,55  n/a | 70,96  100%  17.878  7,69  22,55  100 | 71,88  100%  1.846  7,81  21,55  100 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

Berdasarkan tabel diatas, Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 terlihat bahwa yang sudah mencapai target adalah pencapaian Jumlah koperasi aktif sebanyak 136 koperasi dari 165 koperasi yang ada.

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19.

Persentase BPR/LKM aktif juga sangat baik yakni 100 persen ini menunjukkan aktifitas BPR di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu bertahan dimasa krisis akibat pandemi Covid – 19.

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bidang pembinaan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang pembinaan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif pengerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Data Pelaku UKM yang produktif sebanyak 3.127 Orang dan total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2020 Sebanyak 403 Kelompok, Dengan Jumlah Unit Sebanyak 1.732 Unit Bantuan Peralatan.

Beroperasinya kapal peti kemas yg merupakan sarana logistik tujuan selayar surabaya (pp) yang mengangkut komoditi hasil perikanan, pertanian dan muatan bongkar dari Surabaya berupa bahan pokok dan penting lainnya.

Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 18 dan meningkat menjadi 31 pada tahun 2020. Hal ini disebakan dukungan yang besar pemerintah daerah terhadap pedagang/usaha informal yang ada di daerahnya.

Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan pengendalian dalam upaya peningkatan kinerja pada sektor perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel T-2.3.16 (T-C. 24)sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.3.14 (T-C. 24)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kabupaten Kepulauan Selayar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uraian** | **Anggaran pada Tahun Ke -** | | | | | **Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -** | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan** | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** | ***17*** | ***18*** |
| **Belanja Tidak Langsung** | **2.190.050.000** | **2.705.100.000** | **3.635.100.000** | **3.762.702.000** | **3.670.100.000** | **2.189.000.000** | **2.705.000.000** | **3.635.000.000** | **3.762.700.000** | **3.670.000.000** | **99,95** | **99,9963** | **99,99725** | **99,999947** | **99,99728** | **37** | **36,70** |
| B. Pegawai | 2.190.050.000 | 2.705.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 3.635.100.000 | 165,98 | 134,3795 | 100 | 100 | 100 | 37 | 36,70 |
| **Belanja Langsung** | **9.014.938.400** | **9.817.122.945** | **10.253.719.250** | **11.534.311.850** | **4.826.493.725** | **9.014.938.400** | **9.817.122.945** | **10.253.719.250** | **11.534.311.850** | **4.826.493.725** | **100,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **48,26** | **1,00** |
| B.Pegawai | 408.885.000 | 828.907.500 | 238.560.000 | 209.780.000 | 300.900.000 | 2.099.860.547 | 3.156.795.250 | 3.760.995.394 | 3.715.038.907 | 3.795.272.216 | 5,135 | 3,808 | 15,76 | 17,709 | 12,61 | 30,08 | 48,26 |
| B.Barang dan Jasa | 5.293.945.750 | 5.666.018.259 | 5.918.899.250 | 7.222.403.600 | 3.418.841.858 | 5.179.800.049 | 3.522.318.528 | 3.812.125.438 | 3.602.884.081 | 2.793.781.828 | 97,84 | 62,16 | 64,4 | 49,88 | 81,71 | 34,19 | 27,94 |
| B.Modal | 3.312.107.650 | 3.322.197.186 | 4.096.260.000 | 4.102.128.250 | 1.106.751.867 | 3.103.526.368 | 1.435.319.000 | 3.907.534.864 | 3.387.449.351 | 849.028.136 | 93,7 | 43,2 | 95,39 | 33,16 | 76,71 | 11,68 | 84,9 |
| B.Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949.106.870 | 2.562.195.476 | 212.245.500 | 100 | 99,9992 | 99,99928 | 99,999987 | 100,00 | 100 | 100 |
| **Total** | **11.204.988.400** | **12.522.222.945** | **13.888.819.250** | **15.297.013.850** | **8.496.593.725** | **11.203.938.400** | **12.522.122.945** | **13.888.719.250** | **15.297.011.850** | **8.496.493.725** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **16,99** | **84,96** |

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

**2.4.1.Analisis KLHS**

Kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui :

1. Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2021-2026 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.
3. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.
4. Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Kajian KLHS Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA OPD. Adapun rekomendasinya adalah :

1. Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
2. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri

**2.4.2.Analisis RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam

kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

* 1. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, perdagangan dan konvensi;
  2. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
  3. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
  4. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
  5. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
  6. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
  7. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
  8. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
  9. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  10. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLP yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
8. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

* + 1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
    2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan.
    3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
    4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.

1. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

* 1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
  3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

1. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
6. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* + 1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
    2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
    3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

1. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
5. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan

sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
4. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
4. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan

nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
5. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi
9. sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, yakni program peningkatan sarana distribusi perdagangan dan program perencanaan pembangunan industri dari sudut pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional dalam kerangka pengembangan wilayah meliputi :

* + - 1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari

sudut pandang pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional

2. Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan

3. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memenyajikan faktor-faktor permasalahan pelayanan pencapaian sasaran program RTRW adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas kawasan

2. Pembebasan lahan belum ada Perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan belum ada

Dan untuk faktor-faktor penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi, yaitu :

* + - * 1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis kabupaten.
        2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan.

Sedangkan untuk faktor-faktor pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi, yaitu :

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1
3. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia

Perda No 5 Tahun 2012 tentang RTRW

**2.4.3. Analisis Renstra K/L dan Propinsi**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kepanjangan tangan dari 2 (Dua) Kementrian yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM serta 2 (Dua) Dinas Propinsi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan Propinsi.

**2.4.3.1. Analisis Renstra K/L dan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi**

Untuk Kementerian Koperasi dan UMKM periode 5 (lima) tahun mendatang, sesuai dengan arah kebijakan Renstra 2020-2024 di Kemetrian Koperasi dan UKM bertujuan :

* + 1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern
    2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

Selanjutnya, Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan Mandiri serta Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan indikator Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

* + - 1. Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
      2. Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
      3. Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
      4. Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
      5. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
      6. Persentase Total Investasi UMKM
      7. Persentase UKM Naik Kelas
      8. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
      9. Rasio Kewirausahaan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2018-2023 yaitu mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah.

Untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dan mendorong peningkatan kinerja tahun 2018-2023, adalah :

* + 1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis

Pengelolaan Usaha Koperasi, UKM di lakukan agar tercipta produktifitas keluaran yang mampu berdaya saing secaralokal, regional dan internasional sesuai dengan entitas bisnis dan adanya

kesetaraan iklim usaha bagi semua pelaku usaha secara proporsional demi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator :

* + - 1. Besaran peningkatan produktivitas dari Koperasi dan UKM.
      2. Besaran peningkatan skala usaha.
      3. Besaran peningkatan pemasaran.
      4. Besaran peningkatan pendapatan usaha
      5. Besaran kelembagaan usaha, koperasi dan UKM yang produktif, berstastus hukum legal, dan terstandar.
      6. Standardisasi Pengelolaan Manajemen usaha, Koperasi dan UKM
    1. Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar.

Optimalisasi pemasaran produk ke pasar yang lebih tinggi membutuhkan berbagai upaya dan terobosan agar mampu sinergis dengan persyaratan yang ditetapkan, permintaan pasar dan tentunya spesifikasi konsumen. Indikator :

* + - * 1. Peningkatan skala usaha, volume usaha dan aset yang dimiliki.
        2. Terbentuknya pusat pusat pelayanan Usaha setiap produk yang bernilai tinggi di pasaran.
    1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).

Indikator :

Peningkatan jumlah pelaku usaha wirausaha baru untuk aktif mendirikan usaha kecil dan menengah.

Kemampuan inovatif usaha.

Memiliki budaya usaha yang profesional.

Peningkatan pelanggan.

Peningkatan kemampuan manajerial.

Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi

Peningkatan produk hasil produksi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi dan berdaya saing sesuai standar pasar yang ditetapkan

* + 1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional

Indikator :

* + - * 1. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
        2. Birokrasi yang efisien.
        3. Dukungan manajemen bisnis.
        4. Akses pasar
        5. Event-event bisnis yang bersifat regional, nasional, dan internasional dalam rangka mempromosikan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta produk-produk yang dihasilkan.
        6. Jumlah dana bergulir yang disalurkan.
        7. Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK).
        8. Meningkatnya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
        9. Meningkatnya dana hibah tidak bersyarat untuk membantu permodalan tertentu berbentuk pendanaan dan atau asset.
        10. Tersedianya bapak angkat dalam membantu permodalan sekaligus pemasaran produk
    1. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

Indikator :

Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang.

Jaminan keamanan.

Jaminan keselamatan.

Jaminan Estetika

Penegakan hukum.

Mendirikan pusat-pusat ekonomi kreatif di setiap wilayah.

Peningkatan partisipasi aktif di Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder (Jumlah izin usaha yang ditertibkan di lokasi tertentu dengan nilai ekonomi yang tinggi dan Pembuatan sistem pengawasan dan pembinaan untuk penertiban izin agar lebih efisien dan efektif).

Tersedianya ruang dan luas yang cukup bagi sektor informal berupa lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi terpadu.

Pembangunan Pasar/mall/lokasi khusus bagi pedagang kaki lima (PKL).

Tersedianya data dan Road Map pengelolaan sektor ekonomi informal di setiap wilayah.

Tersedianya Road Map peruntukan usaha pengembangan Koperasi dan UKM di setiap wilayah provinsi Sulawesi Selatan hingga Kecamatan.

Tersedianya panduan dasar dan tata cara pendirian bisnis koperasi dan usaha kecil menengah sesuai tata ruang dan daya dukung wilayah, Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah

* + 1. Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah

Indikator :

* 1. Tersedianya tempat konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah tersebut.
  2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para stakeholder wirausaha sesuai minat, kompetensi dan kebutuhan pasar.
  3. Pendampingan dan pemberdayaan usaha bagi para wirausaha khususnya peningkatan standardisasi kelembagaan dan produk yang berdaya saing dan berteknologi.
  4. Pelaksanaan kerjasama bisnis untuk mempromosikan produk hasil kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersifat regional dan internasional.
  5. Pembuatan pilot project wirausaha di setiap wilayah untuk dijadikan panduan bagi usaha-usaha lain sejenis di wilayah Sulawesi Selatan
     1. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk

Indikator :

* + - 1. Tersedianya layanan investasi satu atap online dan terintegrasi untuk semua perijinan investasi bagi Koperasi dan UKM.
      2. Terbentuknya kelembagaan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk Koperasi dan UKM di setiap wilayah yang memiliki kewenangan dalam penindakan.
      3. Re-evaluasi peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan dan kepastian investasi dalam usaha Koperasi dan UKM.
      4. Peningkatan partisipasi aktif dari stakeholder wilayah dalam memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, konsumen, dan produk dalam lingkup Koperasi dan UKM

Dengan konteks tujuan dan sasaran K/L dan Propinsi tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga pengembangan pelayanan Perangkat Daerah untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah pada lima tahun mendatang diharapkan mampu menentukan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen serta dapat membentuk kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nasional bahkan ekspor.

**2.4.3.2. Analisis Renstra K/L dan Dinas Perdagangan Propinsi**

Untuk Kementerian Perdagangan ada 3 ( tiga ) misi utama yaitu : meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas, menguatkan pasar dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan peguatan jaringan distribusi nasional. Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan, Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Perlindungan konsumen nasional dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif perlindungan konsumen dilakukan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif perlindungan konsumen dilakukan setelah konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024, adalah sebagai berikut :

* + 1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
    2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
    3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualita

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

* + 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa.

2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri.

5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK.

6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, dan

7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor perdagangan yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tujuan Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, adalah meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas dan meningkatnya konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan penguatan pasar dalam negeri, menjaga ketersediaan bahan pokok dan peguatan jaringan distribusi nasional serta Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan sehingga ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

* + 1. Meningkatnya kinerja ekspor non-migas
    2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
    3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dengan konteks tujuan dan sasaran K/L dan Propinsi tersebut,

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah Peningkatan Penataan Sistem Distribusi Nasinal yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestic, oleh karena itu perlu strategi antara lain meningkatkan integrasi antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan

kestabilan harga dapat terjaga dan meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan sehat dan pengamanan perdagangan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.

Adapun fokus dan kegiatan prioritas urusan perdagangan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia;

2. Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan,

3. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan.

**2.4.4.Tantangan dan Peluang**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi adanya tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Beberapa tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada 3 urusan pemerintahan yaitu :

**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

**1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

1. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan
2. Kompleksnya permasalahan yang harus ditangani berkaitan dengan pencapaian koperasi yang sehat dan berkualitas serta UMKM yang inovatif dan berdaya saing
3. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian
4. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.
5. Perlunya rumah kemasan pusat kuliner dan oleh-oleh.
6. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahan.
7. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.
8. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar.
9. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal.
10. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir

**Urusan Pemerintahan Pilihan**

**Urusan Perdagangan**

a. Akses pasar dan jaringan pemasaran masih perlu ditingkatkan;

b. Infrastruktur perdagangan masih perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah;

c. Kesadaran para produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;

d. Masih terbatasnya informasi harga pasar dan pengetahuan tentang teknis pemasaran;

e. Belum adanya kendaraan operasional yang mendukung tugas-tugas kemetrologian

f. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan lembaga perlindungan konsumen

g. Masih terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan konsumen;

h. Masih minimnya bagi para pelaku usaha yang mencamtumkan label informasi kualitas produknya;

i. Semua komoditi asal Selayar belum bisa berstatus ekspor asal selayar karena belum adanya Surat Keterangan Asal Barang yang bisa diterbitkan di Selayar

j. Belum maksimalnya pengembangan Pasar Bonea dikarenakan sampai dengan saat ini pedagang pasar yang menempati Pasar Tempat Pelelangan Ikan belum berhasil direlokasi ke pasar Bonea

k. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.

l. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.

n. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.

o. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang

p. Belum adanya kantor UPTD kemetrologian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGAGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah**

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat dilihat pada tabel 3.1.1 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | | **Masalah** | | **Akar Masalah** |
|
| ***(1)*** | ***(2)*** | | ***(3)*** | | ***(4)*** |
| **Urusan Koperasi dan UKM** | | | | | |
| 1 | SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah | Rendahnya tingkat pendidikan kader koperasi yang relatif tua dan menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK | | umur dan tingkat pendidikan pelaku usaha | |
|  |  | keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan KUKM | | formasi petugas jauh dari kebutuhan | |
| 2 | Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan  perikanan; dan pengembangan UMK yang prolingkungan  (green economy); | Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif  berproduksi | | Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru | |
|  |  | Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat | | Masih rendahnya peningkatan skala  usaha bagi usaha  mikro. | |
|  |  |  | | Masih kurangnya  peningkatan kelompok usaha bersama (KUB)/klaster skala  usaha mikro | |
|  |  |  | | Masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro | |
|  |  | Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat | | Masih rendahnya manajemen koperasi | |
|  |  |  | | Belum semua Koperasi di  Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkinerja baik | |
| 3 | Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah | Masih banyak Koperasi dan KUKM yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya | | Masih banyak yang tidak memiliki identitas ( ktp ) | |
|  |  |  | | Kepala desa dan lurah kurang merespon untuk memfasilitasi warganya | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
|
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** |
| **Urusan Koperasi dan UKM** | | | |
| 4 | Pembuatan laporan keuangan akuntasi | Rendahnya tingkat pendidikan pelaku koperasi | rendahnya pemahaman SDM pelaku koperasi |
| 5 | Kemasan produk dan pemasaran | kurangnya desain kemasan dan izin-izin produk serta belum adanya akses pasar | kurangnya modal dan sulitnya pengurusan izin-izin usaha |
| 6 | pendataan SIKP | belum akuratnya data pelaku usaha | belum adanya validasi data yang spesifik dan pembuatan aplikasi data |
| 7 | dana bergulir koperasi (simpan pinjam) dan dana bergulir pinjaman modal | masih banyak pelaku usaha belum melunasi pembayaran dana bergulir | pengurus koperasi menganggap dana itu dana hibah |
|  |  |  | pengurusnya sudah ada yang meninggal |
| 8 | pendataan dan pengembangan potensi desa | minimnya pemahaman masyarakat tentang potensi unggulan desa | Masih kurangnya  pengetahuan dan bimbingan potensi unggulan desa |
| 9 | bantuan BPUM | banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan | belum memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) dan nomor induk berusaha (NIB) serta NIK yang tidak cocok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
|
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** |
| **Urusan Perdagangan** | | | |
| 1 | Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar | Sinergitas peraturan pusat dan daerah terkait Ekspor bersih perdagangan | Semua komoditi asal Selayar belum bisa berstatus ekspor asal selayar karena belum adanya Surat Keterangan Asal Barang yang bisa diterbitkan di Selayar |
|  |  | Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak swasta | kurangnya akses pemerintah daerah maupun swasta dalam menarik minat investor untuk bekerjasama dalam meningkatkan jaringan distribusi logisitk di Kabupaten Kepulauan Selayar |
|  |  |  | Kegiatan pengiriman barang dari Surabaya ke Selayar sampai dengan saat ini masih belum efektif karena kurangnya dukungan dan kerjasama pihak swasta dan investor |
| 2 | Daya saing produk-produk yang dipromosikan | Akses pasar dan jaringan pemasaran masih perlu ditingkatkan | pembinaan diaspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong Pelaku IKM, pelaku UKM dan pelaku Usaha Perdagangan agar tidak kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar |
| 3 | SDM pelaku usaha perdagangan masih rendah | Rendahnya tingkat pendidikan kader koperasi yang relatif tua dan menyebabkan kesulitan mengadopsi IPTEK | umur dan tingkat pendidikan pelaku usaha |
|  |  | masih terbatasnya petugas yang mampu membina pedagang usaha informal maupun formal untuk mengembangkan usahanya | pedagang pasar masih menetap berhasil direlokasi Tempat Pelelangan Ikan belum berhasil direlokasi ke pasar Bonea |
| 3 | Nilai tambah hasil produksi dari berbagai sektor dan pengembangan produk pasar belum optimal | Masih rendahnya peningkatan skala  usaha bagi pelaku usaha perdagangan | Masih minimnya kualitas produk komiditi unggulan |
|  |  |  | Masih minimnya bagi para pelaku usaha yang mencamtumkan label informasi kualitas produknya |
|  |  |  | Masih terbatasnya informasi harga pasar dan pengetahuan tentang teknis pemasaran |
| 4 | Infrastruktur perdagangan masih perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah | keterbatasan anggaran baik APBN maupun APBD | kurangnya kepedulian petugas dalam menyelesaikan proposal anggaran |
|  |  |  | kurangnya koordinasi dengan pihak terkait |
| 5 | Akses pelaku usaha perdagangan terhadap layanan perbankan relatif rendah | Masih banyak yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya | Masih banyak yang tidak memiliki identitas ( ktp ) dan legalitas usaha |
| 6 | Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTTP | Kurangnya tenaga ahli yang dimiliki sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT | Belum adanya formasi tenaga teknis kemetrologian, baik itu tenaga penera, pengawasa dan penyidik Kemetrologian |
|  |  |  | Tidak adanya pegawai yang akan dikirim untuk mengikuti diklat teknis kemetrologian |
|  |  | SDM yang telah ada tidak mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemetrologian | Anggaran untuk ikut serta dalam diklat teknis kemetrologian yang kurang |
| 7 | Kesadaran wajib tera / pelaku usaha yang masih rendah | Pelaku usaha / wajib tera kurang memahami pentingnya mengikuti tera/tera ulang alat UTTP | Belum tersosialisasikannya secara efektif kewajiban wwajib tera untuk mengikuti pelaksanaan tera dan tera ulang |
|  |  | Peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan alat UTTP | Kurangnya laporan masyarakat terkait penggunaan alat UTTP yang terindikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| 8 | Daya dukung Kendaraan Operasional belum ada | Tidak tersedianya kendaraan operasional | Mobilitas yang tinggi dengan membawa alat standar kemetrologian sangat membutuhkan kendaraan operasional roda empat |

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, manageable, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembanguan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime

serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah :

**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang.

Indikator Utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa;

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau Panjang;

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

4. GERBANG SARI (Gerakan membangun desa mandiri)

Program Gerbang Sari ini bertujuan untuk meningkatkan status desa mejadi desa mandiri.

Kawasan Timur Indonesia maksudnya berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan atau hubungan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sesuai amanat RPJPD 2005-2025, maka dalam lima tahun kedepan, agenda prioritas daerah akan diimplementasikan Tiga Pilar Pembangunan Daerah dan satu Program Unggulan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun masih terdapat permasalahan pokok daerah bidang urusan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terkendala pada pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran.

Misi adalah upaya umum dalam mewujudkan visi. Maka misi yang diajukan oleh Kepala Daerah Terpilih pada Periode 2021-2026 adalah :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan.
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode RPJMD. Maka tujuan yang hendak dicapai pada 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Disdag KUKM
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Disdag KUKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur  Indonesia”** | | | | |
| **No** | **Misi dan Program  KDH dan Wakil KDH  terpilih** | **Permasalahan Pelayanan  OPD DISPERIDAG KUKM** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1. | Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan | 1. Kapasitas SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah 2. Regulasi pelaksanaan ART belum optimal. 3. Dukungan pemerintah setempat dalam pelaksanaan kelembagaan koperasi belum berjalan sebagaimana mestinya 4. Pengelolaan koperasi yang dibangun belum optimal 5. Pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan koperasi masih rendah | 1. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM dan semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan 2. Kompleksnya permasalahan yang harus ditangani berkaitan dengan pencapaian koperasi yang sehat dan berkualitas serta UMKM yang inovatif dan berdaya saing 3. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian | 1. Tersedianya Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Tersedianya keragaman bahan baku hasil pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan yang bisa diolah sebagai produk unggulan dan inovatif melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. |
|  |  | 1. Pemetaan usaha yang potensial masih kurang 2. Fasilitasi SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM belum optimal 3. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota 4. Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya masih banyak 5. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah 6. Masih kurangnya pelaku UKM mengakses dana bantuan baik hibah/dana bergulir 7. Kepala desa dan lurah kurang merespon untuk memfasilitasi warganya 8. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha (tidak memiliki identitas ( ktp ) | 1. Perlunya rumah kemasan pusat kuliner dan oleh-oleh. 2. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahan. 3. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir | 1. Peran Koperasi dan UMK yang merupakan prioritas unggulan pemerintah kabupaten yang akan diutamakan dalam pembangunan lima tahun ke depan. 2. Munculnya beberapa pelaku usaha baru dengan pasar online. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur  Indonesia”** | | | | |
| **No** | **Misi dan Program  KDH dan Wakil KDH  terpilih** | **Permasalahan Pelayanan  OPD DISIDAG KUKM** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 2. | Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 1. Kapasitas Usaha yang rendah karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan KUKM masih kurang. 3. Pelaku KUKM masih banyak yang belum di berdayakan. 4. Kurangnya fasilitas bagi pelaku usaha yang berada dikepulauan | 1. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.  2. Belum maksimalnya peralatan dan permodalan bagi UMKM  3. Kurangnya produk UMKM yang memiliki stander pasar.  4. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal. | 1. Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian. 2. Semakin luasnya prospek penciptaan pasar di dunia maya. |
| 3 | Misi 4 : Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman | 1. Kelangkaan, barang dan instabilitas harga masih seringnya terjadi  2. Upaya penimbunan produk masih seringnya terjadi  3. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis melalui conternisasi yang efektif dan efisien belum optimal  4. Sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM belum memadai  5. Penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya masih tinggi  6. Produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mempunyai daya saing  7. Ketersediaan stok dan disparitas harga dan bahan pokok masih rendah  8. Fasilitas kendaraan operasional kemetrologian belum tersedia | 1. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.  2. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.  3. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang.  4. Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik yakni perdagangan antar pulau terkendala sarana transportasi  5. Meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat  6. Kurang kondusifnya iklim usaha | 1. Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian. 2. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah. 3. Secara geografis Posisi Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI |
|  |  |  | 7. Masih terbatasnya kendaraan operasional.  8. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.  9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang  10. Kurangnya tingkat kesadaran konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.  11. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku  12. Belum adanya kantor UPTD kemetrologian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera |  |

* 1. **Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi**

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 2 kementrian yakni Kementrian Koperasi dan UKM dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Untuk itu, dapat dilihat tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

* + 1. **Telaahan Renstra Kementrian**
       1. **Kementrian Koperasi dan UKM**

Untuk Kementerian Koperasi dan UMKM periode 5 (lima) tahun mendatang, sesuai dengan arah kebijakan Renstra 2020-2024 di Kemetrian Koperasi dan UKM bertujuan :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

Selanjutnya, Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan Mandiri serta Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan indikator Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
2. Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
3. Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
4. Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
5. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
6. Persentase Total Investasi UMKM
7. Persentase UKM Naik Kelas
8. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
9. Rasio Kewirausahaan

Tabel. 3.3.1.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkop dan UKM** | **Permasalahan**  **Pelayanan OPD Dis**  **dag KUKM** | **Sebagai Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1.  2. | Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan Mandiri  Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global | 1. Kapasitas SDM kader koperasi untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah 2. Fasilitasi pelaksanaan ART masih rendah 3. Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya masih banyak 4. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah 5. Kapasitas usaha karena kurangnya pengetahuan ilmu dan teknologi belum berkembang 6. Fasilitasi SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM Bblum optimal | * 1. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian   2. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi   3. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM.   4. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan KUKM  1. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Penyiapan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasam antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan 4. Pengembangan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi 5. Ketersediaan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI ), SDM dan Adanya Aplikasi T I yang sesuai dengan kebutuhan budaya/ Karateristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi |
|  |  |  | 1. Kompleksnya permasalahan yang harus ditangani berkaitan dengan pencapaian koperasi yang sehat dan berkualitas serta UMKM yang inovatif dan berdaya saing | 1. Pencapain koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif. 2. Penentuan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen 3. Percepatan UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nsional bahkan ekspor |

* + - 1. **Kementrian Perdagangan**

Kementerian Perdagangan ada 3 ( tiga ) misi utama yaitu : meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan peguatan jaringan distribusi nasional. Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan, Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Perlindungan konsumen nasional dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif perlindungan konsumen dilakukan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan

barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif perlindungan konsumen dilakukan setelah konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 2020-2024, adalah sebagai berikut :

* + 1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
    2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
    3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

* + - 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok

3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri

5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK

6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, dan

7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Tabel. 3.3.1.2.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendag** | **Permasalahan**  **Pelayanan OPD Disdagkukm KUKM** | **Sebagai Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang bernilai tambah dan rasa.  Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok  Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab  Meningkatnya pasar produk dalam negeri  Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK  Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional  Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan | 1. Orientasi Ekspor Barang Non-Migas belum optimal. 2. Kelangkaan barang, upaya penimbunan produk dan instabilitas harga masih sering terjadi 3. Produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mempunyai daya saing 4. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya 5. Sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM belum memadai | 1.Kurang kondusifnya iklim usaha  2.Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar  3. Meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat  4. Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik yakni perdagangan antar pulau terkendala sarana transportasi | 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  2. Dukungan Peraturan Perundang-undangan disektor perindustrian  3. Ketersediaan SDA yang dapat mendukung pengembangan usaha disektor Perdagangan  4. Bandar maritim didukung oleh3 pilar pembangunan yakni kawasan distribusi logistik ditopang oleh 5 sub kawasan , KEK dan KIPT  5. Rencana, penataan pedagang kaki lima dan pemberdayaan masyarakat di 5 desa yang termasuk prioritas gerakan membangun desa mandiri |

* + 1. **Telaahan Renstra Provinsi**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 3 Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Provinsi Selatan dan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, dapat dilihat tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

* + - 1. **Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi**

Demikian juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2018-2023 yaitu mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah.

Untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dan mendorong peningkatan kinerja tahun 2018-2023, adalah :

* + 1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis

Pengelolaan Usaha Koperasi, UKM di lakukan agar tercipta produktifitas keluaran yang mampu berdaya saing secaralokal, regional dan internasional sesuai dengan entitas bisnis dan adanya kesetaraan iklim usaha bagi semua pelaku usaha secara proporsional demi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator :

a. Besaran peningkatan produktivitas dari Koperasi dan UKM.

* 1. Besaran peningkata nskala usaha.
  2. Besaran peningkatan pemasaran.
  3. Besaran peningkatan pendapatan usaha
  4. Besaran kelembagaan usaha, koperasi dan UKM yang produktif, berstastus hukum legal, dan terstandar.
  5. Standardisasi Pengelolaan Manajemen usaha, Koperasi dan UKM
     1. Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar.

Optimalisasi pemasaran produk ke pasar yang lebih tinggi membutuhkan berbagai upaya dan terobosan agar mampu sinergis dengan persyaratan yang ditetapkan, permintaan pasar dan tentunya spesifikasi konsumen. Indikator :

* + - * 1. Peningkatan skala usaha, volume usaha dan aset yang dimiliki.
        2. Terbentuknya pusat pusat pelayanan Usaha setiap produk yang bernilai tinggi di pasaran.
    1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).

Indikator :

Peningkatan jumlah pelaku usaha wirausaha baru untuk aktif mendirikan usaha kecil dan menengah.

Kemampuan inovatif usaha.

Memiliki budaya usaha yang profesional.

Peningkatan pelanggan.

Peningkatan kemampuan manajerial.

Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi

Peningkatan produk hasil produksi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi dan berdaya saing sesuai standar pasar yang ditetapkan

* + 1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional

Indikator :

1. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
2. Birokrasi yang efisien.
3. Dukungan manajemen bisnis.
4. Akses pasar.
5. Event-event bisnis yang bersifat regional, nasional, dan internasional dalam rangka mempromosikan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta produk-produk yang dihasilkan.
6. Jumlah dana bergulir yang disalurkan.
7. Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK).
8. Meningkatnya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
9. Meningkatnya dana hibah tidak bersyarat untuk membantu permodalan tertentu berbentuk pendanaan dan atau asset.
10. Tersedianya bapak angkat dalam membantu permodalan sekaligus pemasaran produk
    * 1. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

Indikator :

1. Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang.
2. Jaminan keamanan.
3. Jaminan keselamatan.
4. Jaminan Estetika
5. Penegakan hukum.
6. Mendirikan pusat-pusat ekonomi kreatif di setiap wilayah.
7. Peningkatan partisipasi aktif di Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder (Jumlah izin usaha yang ditertibkan di lokasi tertentu dengan nilai ekonomi yang tinggi dan Pembuatan sistem pengawasan dan pembinaan untuk penertiban izin agar lebih efisien dan efektif).
8. Tersedianya ruang dan luas yang cukup bagi sektor informal
9. berupa lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi terpadu.
10. Pembangunan Pasar/mall/lokasi khusus bagi pedagang kaki lima (PKL).
11. Tersedianya data dan Road Map pengelolaan sektor ekonomi informal di setiap wilayah.
12. Tersedianya Road Map peruntukan usaha pengembangan Koperasi dan UKM di setiap wilayah provinsi Sulawesi Selatan hingga Kecamatan.
13. Tersedianya panduan dasar dan tata cara pendirian bisnis koperasi dan usaha kecil menengah sesuai tata ruang dan daya dukung wilayah, Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah
    * 1. Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah

Indikator :

* 1. Tersedianya tempat konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah tersebut.
  2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para stakeholder wirausaha sesuai minat, kompetensi dan kebutuhan pasar.
  3. Pendampingan dan pemberdayaan usaha bagi para wirausaha khususnya peningkatan standardisasi kelembagaan dan produk yang berdaya saing dan berteknologi.
  4. Pelaksanaan kerjasama bisnis untuk mempromosikan produk hasil kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersifat regional dan internasional.
  5. Pembuatan pilot project wirausaha di setiap wilayah untuk dijadikan panduan bagi usaha-usaha lain sejenis di wilayah Sulawesi Selatan
     1. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk

Indikator :

* + - 1. Tersedianya layanan investasi satu atap online dan terintegrasi untuk semua perijinan investasi bagi Koperasi dan UKM.
      2. Terbentuknya kelembagaan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk Koperasi dan UKM di setiap wilayah yang memiliki kewenangan dalam penindakan.
      3. Re-evaluasi peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan dan kepastian investasi dalam usaha Koperasi dan UKM.
      4. Peningkatan partisipasi aktif dari stakeholder wilayah dalam memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, konsumen, dan produk dalam lingkup Koperasi dan UKM

Tabel. 3.3.2.1.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi** | **Permasalahan**  **Pelayanan OPD Disdag KUKM** | **Sebagai Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1. | Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis | 1. Kapasitas SDM kader koperasi dan UKM untuk melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat masih rendah | 1. Rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi. | 1. Ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi  peningkatan skala usaha dan skala pasar dan |
|  |  |  |  | didukung oleh aturan yang pasti. |
| 2.  3.  4.  5.  6. | Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar  Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).  Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional.  Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.  Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah | 1. pemberdayaan dan pengembangan KUKM belum optimal 2. kapasitas usaha karena kurangnya SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM pengetahuan ilmu dan teknologi belum berkembang 3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan masih rendah 4. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan KUKM belum optimal 5. Pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan koperasi masih rendah | 1. Belum berkembangnya kapasitas usaha karena kurangnya SDM, temu bisnis, bimbingan dan konsultasi KUKM pengetahuan ilmu dan teknologi 2. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar 3. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahan. 4. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta 5. Perlunya rumah kemasan pusat kuliner dan oleh-oleh produk lokal. | 2. Tersedianya sentra-sentra usaha pertumbuhan baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah serta lingkungan  3. Penentuan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen  4.Percepatan UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nsional bahkan ekspor |

* + - 1. **Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor perdagangan yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tujuan Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, adalah meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas dan meningkatnya konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan penguatan pasar dalam negeri, menjaga ketersediaan bahan pokok dan peguatan jaringan distribusi nasional serta Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional.

Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan sehingga ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja ekspor non migas
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

Tabel. 3.3.2.2.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Propinsi** | **Permasalahan**  **Pelayanan OPD Disdag KUKM** | **Sebagai Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1.  2.  3. | Meningkatnya kinerja ekspor non migas  Tumbuh dan Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab | 1. Kelangkaan barang, upaya penimbunan produk dan instabilitas harga masih sering terjadi 2. kapasitas teknologi, SDM dan sistem produksi masih perlu ditingkatkan | 1. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku perdagangan  2. Kelangkaan barang, upaya penimbunan produk dan instabilitas harga masih sering terjadi  3. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk Perdagangan,  4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang  5. Kurangnya tingkat kesadaran konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.  6. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku  7. Belum adanya kantor UPTD kemetrologian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera | 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  2. Ketersediaan SDA yang dapat mendukung pengembangan usaha disektor Perdagangan  3. Rencana penataan pedagang kaki lima di 5 desa yang termasuk prioritas gerakan membangun desa mandiri  4. Bandar maritim didukung oleh3 pilar pembangunan yakni kawasan distribusi logistik ditopang oleh 5 sub kawasan , KEK dan KIPT |

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD**
     1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

1. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, perdagangan dan konvensi;
2. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
3. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
4. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
5. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
6. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
7. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
8. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
9. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
10. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
8. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
6. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah. Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
   * 1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
     2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
     3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
7. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
5. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
2. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
3. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
4. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
5. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
9. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, yakni program peningkatan sarana distribusi perdagangan dari sudut pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional dalam kerangka pengembangan wilayah meliputi :

1. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan

2. Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

Tabel 3.4.1.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD** | **Permasalahan**  **Pelayanan OPD** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
|  | 1.Rehabilitasi dan  Pengembangan  Kawasan Strategis  Kabupaten dari  sudut pandang  pandang daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan kawasan-kawasan fungsional  2. Rehabilitasi/  Revitalisasi  kawasan  3. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan | 1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas kawasan  2. pembebasan lahan belum ada  3. perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan belum ada | 1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis provinsi. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan. | 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1 3. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia 4. Perda No 5 Tahun 2012 tentang RTRW |

* + 1. **Telaahan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS)**

Sedangkan tujuan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2021-2026 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.
3. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.
4. Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Kajian KLHS Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA OPD. Adapun rekomendasinya adalah :

1. Penumbuhan dan pengembangan Sektor Perdagangan dan sektor KUKM
2. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Sektor Perdagangan dan Sektor KUKM
   1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Setelah direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditentukan isu-isu strategis :

**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

**Urusan Koperasi dan UKM**

1. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat. Peningkatan anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN dengan mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengupayakan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI), SDM dan Adanya Aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan budaya/ Karateristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi.
2. Peningkatan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan dengan mengupayakan mengembangkan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi
3. Peningkatan Pencapaian koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dengan menyiapkan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasama antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan.
4. Peningkatan strategi pemetaan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen atau selera pasar
5. Peningkatan jaringan distribusi barang dan jasa melalui kapal muat container selayar ke surabaya dan ke kota lainnya mempunyai

potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim

1. Pembentukan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nsional bahkan ekspor

**Urusan Pemerintahan Pilihan**

**Urusan Perdagangan**

1. Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Peningkatan diaspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong UKM yang tidak kalah bersaing dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar
3. Peningkatan kontribusi perdagangan terhadap PDRB.
4. Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTTP.
5. Perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan distribusi logistik yang berpotensi cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim.
6. Peningkatan produk-produk unggulan yang dipromosikan dengan mengutamakan komoditi ekspor agar investor dapat membuka peluang lapangan usaha bagi msyarakat,
7. Sigernitas pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 3.4.2.1

Nilai Skala Kriteria

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Isu Strategis** | **Nilai Skala Kriteria** | | | | | | **Total Skor** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** |
| **Urusan Koperasi dan UKM** | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 55 |
| 2 | Peningkatan anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN dengan mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengupayakan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI), SDM dan Adanya Aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan budaya/ Karateristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 25 | 85 |
| 3 | Peningkatan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan dengan mengupayakan mengembangkan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 4 | Peningkatan Pencapaian koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dengan menyiapkan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasama antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 5 | Peningkatan strategi pemetaan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen atau selera pasar |  |  | 20 | 10 | 15 |  | 45 |
| 6 | Peningkatan jaringan distribusi barang dan jasa melalui kapal muat container selayar ke surabaya dan ke kota lainnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritime | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 7 | Pembentukan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nsional bahkan ekspor | 20 |  | 20 | 10 | 15 |  | 65 |
| **Urusan Perdagangan** | | | | | | | | |
| 1 | Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 2 | Peningkatan diaspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM, UKM yang tidak kalah bersaing dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 25 | 85 |
| 3 | Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTTP | 20 |  | 20 | 10 | 15 | 25 | 90 |
| 4 | Perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan distribusi logistik yang berpotensi cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritime | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 5 | Peningkatan produk-produk unggulan yang dipromosikan dengan mengutamakan komoditi ekspor agar investor dapat membuka peluang lapangan usaha bagi msyarakat | 20 |  | 20 | 10 | 15 | 25 | 90 |
| 6 | Sigernitas pemerintah pusat dan daerah | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 |  | 75 |
|  | Peningkatan kontribusi perdagangan terhadap PDRB | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 |  | 75 |

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD.

Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA OPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2020, substansi RPJM Nasional 2020-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD

2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah : **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”** Sehingga visi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kkepulauan Selayar adalah : **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan”** Visi tersebut di atas mengandung makna :

1. Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat yaitu untuk mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dilandasi perekonomian daerah berbasis Kerakyatan

2. Berdaya Saing dan berkelanjutan yakni partisipasi masyarakat yang Berkelanjutan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2020-2026 adalah :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;

5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 adalah mengembang amanah dengan melaksanakan misi ke-1, misi ke-2, ke-3 dan k3-4 adalah :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman.
   1. **Tujuan Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa

mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Disperindag KUKM.
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan penguatan pasar dalam negeri guna meningkatkan perdagangan daerah

Tabel 4.1.1

Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Disdagkukm

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

|  |  |
| --- | --- |
| **MISI** | **TUJUAN** |
| 1. Mengembangkan Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan tranparan 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 3. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman | 1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kemandirian Pelaku Usaha 3. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri |

* 1. **Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Komponen Manajemen Kinerja Disdagkukm KUKM
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Indikator tujuan/sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.2.1 di bawah ini :

Tabel 4.2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MISI** | **TUJUAN** | **SASARAN** |
| 1. Mengembangkan Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan tranparan 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha | 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah    1. Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha |
| 1. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman | 1. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | * 1. Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan |

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD Dinas Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran OPD Perindag KUKM dan target kinerja sasaran OPD Perindag KUKM dapat dilihat pada Tabel 4.2.2. di bawah ini.

**Tabel 4.2.2. Indikator Sararan dan Target Kinerja Sasaran (Sebelum Perubahan)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1  2 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah  Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha | 1. Meningkatnya nilai SAKIP 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah   Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | * + - * Nilai Perencanaan Kinerja | | 18,25 | 19,25 | 21,25 | 23,25 | 24,25 | 25,25 |
| - | Nilai Pengukuran Kinerja | 12,15 | 13,15 | 14,15 | 15,15 | 16,15 | 17,15 |
| - | Nilai Pelaporan Kinerja | 11,15 | 12,15 | 13,15 | 14,15 | 15,15 | 16,15 |
| - | Nilai Evaluasi Internal | 10,51 | 11,51 | 12,51 | 13,51 | 14,51 | 15,51 |
|  | Indeks Kepuasan Layanan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Laporan Keuangan sesuai SAP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase koperasi aktif | 82,42 | 85,5 | 88 | 91,5 | 94 | 96 |
| - | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase BPR/LKM aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase Koperasi yang berkualitas | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| - | Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha | 19.364 | 25.012 | 31.058 | 35.364 | 39.691 | 44.550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 3 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha | Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha | - | Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB | 2,88 | 2,9 | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,98 |
| - | Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 7,86 | 7,88 | 7,9 | 7,92 | 7,94 | 7,96 |
| - | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah | 1.227 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| - | Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja | n/a | 0,67 | 1,73 | 4,48 | 11,59 | 30 |
| - | Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem  Informasi nasional | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Cakupan bina kelompok pengrajin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 4 | Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal | - | Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase kinerja realisasi pupuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku | 10,129 | 12,04 | 13,12 | 14,31 | 15,59 | 17 |
| - | Persentase produk lokal yang dipasarkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tabel 4.2.3. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | Cakupan kemandirian pelaku usaha | 11,17 | 12,75 | 13,98 | 15,21 | 16,43 |
| Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 18,84 | 21,01 | 22,46 | 23,91 | 25,36 |
| Persentase Kemandirian UMK | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
| 2 | Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan. | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 7,88 | 7,91 | 7,92 | 7,94 | 7,96 |
| Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75 | 81,25 |
| Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kecukupan Komoditas Perdagangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah | 66 (B) | 70 (B) | 74 (B) | 78 (B) | 82 (B) |
|  | Nilai SAKIP perangkat daerah | 65 (B) | 70 (BB) | 75 (BB) | 80 (A) | 80 (A) |
| Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | Sesuai |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 80 (B) | 82 (B) | 84 (B) | 86 (B) | 88 (B) |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi**

Rumusan strategi juga merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Melaluiparameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya ”berfikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, tranparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi *(learning process).*

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

Kebijakan strategis harus dapat meningkatan kapabilitas SDM pelaku usaha perdagangan, dan pelaku UKM yang mampu mewujudkan :

* Optimalisasi peranan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global
* Pengembangan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung perekonomian daerah
* Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta koperasi dan UKM
* Peningkatan pasar produk dalam negeri
* Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan
* Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
* Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan optimal maka perlu dilakukan analisis SWOT terhadap potensi dan faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Analisis SWOT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kekuatan (strength)** | **Kelemahan (weakness)** |
| 1. Adanya Komitmen Bupati Terpilih. 2. Dukungan kelembagaan pemerintah daerah yakni adanya Peraturan dan Perundang-undangan di sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah 4. Kebijakan Pemerintah terkait penuntasan kemiskinan 5. Tersedianya secara cukup sumber-sumber ekonomi daerah 6. Ketersediaan sumberdaya alam yang dapat mendukung pengembangan usaha di bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7. Posisi Strategis SELAYAR yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI | 1. Masih relatif lemahnya koordinasi antar pegawai dan koordinasi dengan bidang lain di lingkungan dinas, para stakeholder dan instansi terkait. 2. Belum diperhatikannya aspek profesionalisme dalam seleksi dan penempatan personil serta job description. 3. Sarana dan prasarana sebagai pendukung yang masih kurang memadai. 4. Adanya keterbatasan dana (anggaran) untuk unit kerja setiap tahunnya. 5. Adanya jarak yang jauh antara tempat produksi dan tempat pemasaran. 6. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri pulau-pulau yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perberdayaan KUKM terlambat dan tidak tepat waktu 7. Terbatasnya ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah |
| 1. Komposisi Penduduk didominasi penduduk usia produktif 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja aparatur 3. Tersedianya lapangan kerja 4. Product, Price, Place, Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen 5. Adanya program prioritas pembangunan PDL, KIPT dan KEK serta dan program pendukung gerakan membangun desa mandiri | 1. Terbatasnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional maupun struktural untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan ahli (menguasai secara teknis bidangnya) 2. Masih lemahnya data dan informasi sehingga menyulitkan dalam perencanaan 3. Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah yang masih rendah (kualitas teknis, kompetensi,kewirausahaan dan manajemen) 4. Masih terbatasnya infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik 5. Masih terbatasnya akses Koperasi, UMKM, dan Perdagangan kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar). 6. Masih kurangnya modal untuk Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peluang (Opportunities)** | | **Tantangan (treaths)** |
| 1. Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian 2. Potensi luas lahan untuk mendukung 3 pilar dan gerbang sari masih cukup besar 3. Tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja dan wirausaha melalui sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Tersedianya keragaman bahan baku hasil pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan yang bisa diolah sebagai produk unggulan dan inovatif melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 5. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah. 6. Peran Koperasi dan UMK yang merupakan prioritas unggulan pemerintah kabupaten yang akan diutamakan dalam pembangunan lima tahun ke depan | | 1. Adanya distorsi harga lahan saat dilakukan pembebasan lahan 2. Masih adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi mutu produk, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3. Masuknya produk impor yang menyebabkan produk UKM semakin terhimpit dan adanya tekanan persaingan 4. Meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat 5. Kurang kondusifnya iklim usaha 6. Banyaknya pendatang dari daerah lain yang lebih mampu mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia 7. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri dan perdagangan. 8. Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik yakni perdagangan antar pulau terkendala sarana transportasi |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Secara geografis Posisi Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI.    1. Adanya dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin mempermudah pelaksanaan tugas dan kewajiban. |  |

* 1. **Arah Kebijakan**

Adapun arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Selanjutnya, Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 5.2.1 berikut ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia** | | | |
| **Misi I : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan  keuangan | * Meningkatnya   Kualitas  Pelayanan kepada  Masyarakat   * Meningkatnya nilai SAKIP * Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah | * Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik * Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil * Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku | * Peningkatan kedisplinan dan kapasitas sumber daya aparatur * Peningkatan sarana dan prasanara aparatur |
| **Misi II : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | * Optimalisasi peranan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global * Mendukung program gerbang sari didalam pengembangan SDM masyarakat dan pelaku usaha perdagangan dan pelaku UKM, jalan, infrastruktur desa, air bersih, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, koperasi desa * Pengembangan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung program prioritas pembangunan PDL, KIPT, KEK dan dan program gerakan membangun desa mandiri di 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar | * Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana untuk desa * Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat desa * Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin * Perluasan lapangan kerja |

**Tabel 5.2.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah**

**Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebelum Perubahan)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi III : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha | Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha | * Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab * Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian koperasi dan UKM | * Mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan produk lokal * Meningkatkan produk unggulan daerah * Meningkatkan promosi dan pengembangan usaha pelaku dan UKM |
| **Misi IV. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi local | * Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan * Peningkatan pasar produk dalam negeri * Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan * Peningkatan Peranan kelembagaan/investor dalam dan luar negeri | * Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia; * Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan * Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan * Meningkatkan perdagangan daerah dengan penguatan pasar dalam negeri |

**Tabel 5.2.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia** | | | |
| **Misi I : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | * Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik * Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil * Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku | * Peningkatan kedisplinan dan kapasitas sumber daya aparatur * Peningkatan sarana dan prasanara aparatur |
| **Misi III : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | * Optimalisasi peranan pelaku usaha dalam mengelola SDA menjadi produk yang bermutu yang mampu bersaing dalam pasar global * Mendukung program gerbang sari didalam pengembangan SDM masyarakat dan pelaku usaha perdagangan dan pelaku UKM, jalan, infrastruktur desa, air bersih, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, koperasi desa * Pengembangan Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dalam mendukung program prioritas pembangunan PDL, KIPT, KEK dan dan program gerakan membangun desa mandiri di 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar | * Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana untuk desa * Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat desa * Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin * Perluasan lapangan kerja |

**Kab. Kepulauan Selayar (Setelah Perubahan)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi IV. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan | * Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan * Peningkatan pasar produk dalam negeri * Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan * Peningkatan Peranan kelembagaan/investor dalam dan luar negeri | * Peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia; * Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan * Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan * Meningkatkan perdagangan daerah dengan penguatan pasar dalam negeri |

Selayar Sebagaimanna digambarkan pada visi, misi, program Bupati/Wakil Bupati terpilih, program prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu 3 (tiga) pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari visi bandar maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

* + - 1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL)
      2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Periwisata
      3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Program pendukung yaitu :

Gerakan membangun desa mandiri (Gerbang Sari)

Mengacu pada tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, peran dinas dalam mendukung Program Prioritas dan Program Unggulan untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

* + - 1. Dalam mendukung pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), dinas focus pada kegiatan prioritas peningkatan Jaringan Distribusi Logistik adalah dengan meningkatkan jaringan distribusi nasional untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia, pengembangan kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan
      2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung dan memaksimalkan pernannya terhadap pengembangan Pusat Distribusi Logistik dengan berbagai agenda :

1) Penyusunan Master Plan dan rancangan infrastruktur kawasan PDL dengan Zona Distribusi seluas 30 HA, Zona Pelayanan Peti Kemas seluas 50 HA, Zona Industri seluas 150 HA, dan Pembebasan Lahan Kawasan PDL

2) Pembangunan/peningkatan Infrastrukutr Jalan dari Kota benteng ke kawasan ( Jalan Nasional ) melalui Pembangunan jalan dalam kawasan PDL, Zona Distribusi seluas 30 HA, Sertifikasi Operasional bagi pengelola seperti Sertifikasi Certifikat of Original Barang ( COO ), Sertifikat Manajemen Mutu Barang, Sertifikat Kwuality Control Produksi, Sertifikat Keselamatan Kerja, Sertifikat Pengawasan Industri

3) Pengelolaan BOT Kawasan PDL, melalui Pengelolaan Kawasan Sub Sentra kawasan pelabuhan jampea, kayuadi, kalautoa, bonerate, benteng, Pemindahan aktifitas PT Pelindo IV MKS ke dalam Kawasan PDL, Fasilitasi kerjasama antar lembanga atau perusahaan, dan International Exhibitions

4) Percepatan menjadi Pusat Pertumbhahan Industri Nisonal ( WPP ) meliputi Pengutan Industri Hilir di kabupaten Selayar dan Percepatan pengelolaan kemandirian pengelolaan kawasan PDL

* + - 1. Mendukung program gerbang sari didalam pembentukan sentra kuliner, pembentukan koperasi berbasis pemberdayaan, penataan di 5 desa yang menjadi prioritas gerbang sari, pengembangan SDM masyarakat Desa Patilereng, Desa Bahuluang, Desa appatanah, Desa Bontosunggu dan Desa Bontomarannu dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dan pelaku usaha perdagangan, pelaku IKM dan pelaku UKM untuk mengelola produksi yang berkualitas sesuai tuntutan dan selera pasar, pembangunan jalan, infrastruktur desa, air bersih, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, koperasi desa, semua diarahkan ke program gerbang sari dengan mengerahkan bundes tingkat desa, sentra industri pengolahan ikan di desa bontosunggu, sentra kelapa terpadu di desa buki, sentra pandai besi di desa bungaiya, sentra pengelolaan pisang dan sentra industripembangunan perahu rakyat di bonerate, pembangunan kios/tenan untk sentra kuliner khas selayar, pengembangan SDM Pelaku UKM, IKM dan pelaku perdagangan dengan memberikan pelatihan manajemen industri, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan industri berbasis pertanian (pengolahan kelapa dan turunannya), pembinaan dan pembentukan organisasi pedagang kaki lima,fasilitasi pelaku IKM, UKM dalam peningkan kualitas produksi yang mampu berdaya saing dalam pasar global.

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

* 1. **RENCANA PROGRAM**

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut ini program dan kegiatan indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepualaun Selayar untuk kurun waktu tahun 2021-2026 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
11. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
12. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
13. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
14. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
15. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
16. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
18. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
19. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
20. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
21. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
22. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
23. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
24. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
25. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
26. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
27. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
28. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
29. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
30. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
31. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
32. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
33. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
34. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
35. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
36. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
37. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
38. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
39. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
40. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
41. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
42. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
43. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
44. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
45. Pemeriksaan Penyimpanan Makanan Berbahaya
46. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
47. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
48. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
49. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
50. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
51. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
52. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
53. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
54. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
56. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
57. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
58. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
59. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
60. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
61. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
63. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
64. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
65. Pameran Dagang Nasional
66. Pameran Dagang Lokal
67. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
68. Peningkatan Citra Produk Ekspor
69. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
70. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
71. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
72. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
73. Penyidikan Metrologi Legal
74. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
75. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
76. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
77. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
78. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
    1. **KELOMPOK SASARAN**

Selanjutnya guna mendukung efektifitas sasaran program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh :

1. OPD yang terkait bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pelaku usaha UKM dan Koperasi yang berpotensi sebagai sumber penguatan perekonomian kerakyatan Masyarakat
3. Lembaga/Institusi lainnya yang mendukung peningkatan peran UKM dan Koperasi dalam peningkatkan produktivitas
   1. **INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam tabel 6.3.1. beriku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Tabel 6.3.1) Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan/Sasaran** | **Kode** | | | | | | **Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD PJ** | **Lokasi** |
| **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra** | |
| **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |  | (21) |
| (1) | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perindag KUKM | Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai AKIP Dinas Perindag KUKM |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,01 | 60,1 |  | 65,15 |  | 70,25 |  | 75,35 |  | 80,45 |  | 80,45 |  |  | DisperindagKUKM |
|  |  |  | Nilai perencanaan kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,25 | 19,25 |  | 21,25 |  | 23,25 |  | 24,25 |  | 25,25 |  | 25,25 |  |  |  |
|  |  |  | Nilai pengukuran kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,15 | 13,15 |  | 14,15 |  | 15,15 |  | 16,15 |  | 17,15 |  | 17,15 |  |  |  |
|  |  |  | Nilai pelaporan kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,15 | 12,15 |  | 13,15 |  | 14,15 |  | 15,15 |  | 16,15 |  | 16,15 |  |  |  |
|  |  |  | Nilai evaluasi internal |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,51 | 11,51 |  | 12,51 |  | 13,51 |  | 14,51 |  | 15,51 |  | 15,51 |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 1,10 |  | 1,25 |  | 1,30 |  | 1,45 |  | 1,55 |  | 1,77 |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sesuai | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** |  |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan(%)** | **100** | **100** | **6.288.450.000** | **100** | **6.374.538.881** | **100** | **6.534.093.589** | **100** | **6.690.846.494** | **100** | **6.850.490.091** | **100** | **6.850.490.091** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)** | **100** | **100** |  | **100** |  | **100** |  | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** |  | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun** | **100** | **100** | **140.500.000** | **100** | **156.500.000** | **100** | **175.000.000** | **100** | **199.000.000** | **100** | **228.000.000** | **100** | **228.000.000** |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **01** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 30.000.000 | 3 Dokumen | 32.000.000 | 3 Dokumen | 35.000.000 | 3 Dokumen | 40.000.000 | 3 Dokumen | 45.000.000 | 3 Dokumen | 45.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **02** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 16.500.000 | 1 Dokumen | 19.000.000 | 1 Dokumen | 23.000.000 | 1 Dokumen | 23.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **03** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.500.000 | 1 Dokumen | 13.500.000 | 1 Dokumen | 16.500.000 | 1 Dokumen | 19.000.000 | 1 Dokumen | 23.000.000 | 1 Dokumen | 23.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **04** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 8.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 13.000.000 | 1 Dokumen | 16.000.000 | 1 Dokumen | 16.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **05** | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000 | 1 Dokumen | 8.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 13.000.000 | 1 Dokumen | 16.000.000 | 1 Dokumen | 16.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **06** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000 | 4 Laporan | 43.000.000 | 4 Laporan | 46.000.000 | 4 Laporan | 50.000.000 | 4 Laporan | 55.000.000 | 4 Laporan | 55.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **01** | **07** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Laporan | 13 Laporan | 35.000.000 | 13 Laporan | 38.000.000 | 13 Laporan | 41.000.000 | 13 Laporan | 45.000.000 | 13 Laporan | 50.000.000 | 13 Laporan | 50.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100** | **100** | **4.309.000.000** | **100** | **4.330.500.000** | **100** | **4.374.479.224** | **100** | **4.424.437.906** | **100** | **4.454.700.000** | **100** | **4.454.700.000** |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 Orang | 39 Orang | 4.286.000.000 | 39 Orang | 4.302.000.000 | 39 Orang | 4.339.179.224 | 39 Orang | 4.382.937.906 | 39 Orang | 4.405.000.000 | 39 Orang | 4.405.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000 | 1 Laporan | 13.500.000 | 1 Laporan | 15.300.000 | 1 Laporan | 17.500.000 | 1 Laporan | 20.700.000 | 1 Laporan | 20.700.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000 | 12 laporan | 8.000.000 | 12 laporan | 11.000.000 | 12 laporan | 13.000.000 | 12 laporan | 15.000.000 | 12 laporan | 15.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000 | 12 Dokumen | 7.000.000 | 12 Dokumen | 9.000.000 | 12 Dokumen | 11.000.000 | 12 Dokumen | 14.000.000 | 12 Dokumen | 14.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **03** |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun** | **100** | **100** | **6.000.000** | **100** | **8.000.000** | **100** | **11.000.000** | **100** | **13.000.000** | **100** | **15.000.000** | **100** | **15.000.000** |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.000.000 | 4 Laporan | 8.000.000 | 4 Laporan | 11.000.000 | 4 Laporan | 13.000.000 | 4 Laporan | 15.000.000 | 4 Laporan | 15.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  | Laporan |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **100** | **100,00** | **109.500.000** | **100** | **116.000.000** | **100** | **132.500.000** | **100** | **146.200.000** | **100** | **163.914.385** | **100** | **163.914.385** |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | Paket |  | Paket |  | Paket |  | Paket |  | Paket |  | Paket |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000 | 4 Dokumen | 7.000.000 | 4 Dokumen | 15.000.000 | 4 Dokumen | 17.000.000 | 4 Dokumen | 22.914.385 | 4 Dokumen | 22.914.385 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 05 | 05 | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 10.000.000 | 2 Dokumen | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Org | 4 Org | 72.500.000 | 4 Org | 75.000.000 | 4 Org | 80.000.000 | 4 Org | 90.000.000 | 4 Org | 96.000.000 | 4 Org | 96.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Org | 2 Org | 22.000.000 | 2 Org | 24.000.000 | 2 Org | 27.500.000 | 2 Org | 29.200.000 | 2 Org | 35.000.000 | 2 Org | 35.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daeah** | **Persentase Kelancaran Administras dan Operasional Perkantoran** | **100** | **100** | **635.200.000** | **100** | **652.500.000** | **100** | **678.200.000** | **100** | **706.900.000** | **100** | **741.500.000** | **100** | **741.500.000** |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | 70 Paket | 190.000.000 | 70 Paket | 195.000.000 | 70 Paket | 200.000.000 | 70 Paket | 211.000.000 | 70 Paket | 215.000.000 | 70 Paket | 215.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 70 Paket | 75 Paket | 60.000.000 | 83 Paket | 63.000.000 | 87 Paket | 70.000.000 | 90 Paket | 72.000.000 | 94 paket | 75.000.000 | 94 paket | 75.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 5.200.000 | 3 Dokumen | 7.500.000 | 3 Dokumen | 8.000.000 | 3 Dokumen | 11.000.000 | 3 Dokumen | 14.500.000 | 3 Dokumen | 14.500.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 500 Laporan | 500 Laporan | 30.000.000 | 500 Laporan | 32.000.000 | 500 Laporan | 34.700.000 | 510 Laporan | 37.000.000 | 510 Laporan | 40.000.000 | 510 Laporan | 40.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 272 Laporan | 272 Laporan | 350.000.000 | 272 Laporan | 355.000.000 | 272 Laporan | 365.500.000 | 282 Laporan | 375.900.000 | 282 Laporan | 397.000.000 | 282 Laporan | 397.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran** | **100** | **100** | **415.449.700** | **100** | **423.000.000** | **100** | **434.000.000** | **100** | **450.000.000** | **100** | **467.000.000** | **100** | **467.000.000** |  | Benteng |
|  |  |  | 2 Unit | 3 | 31 | 01 | 2 | 07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 | 2 Unit | 40.000.000 | 2 Unit | 40.000.000 | 2 Unit | 40.000.000 | 2 Unit | 40.000.000 | 2 Unit | 40.000.000 | 2 Unit | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 Unit | 7 Unit | 139.449.700 | 7 Unit | 141.000.000 | 7 Unit | 145.000.000 | 7 Unit | 150.000.000 | 7 Unit | 155.000.000 | 7 Unit | 155.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 7 Unit | 100.000.000 | 7 Unit | 103.000.000 | 7 Unit | 105.000.000 | 7 Unit | 110.000.000 | 7 Unit | 115.000.000 | 7 Unit | 115.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 unit | 113.000.000 | 2 Unit | 115.000.000 | 2 Unit | 118.000.000 | 2 Unit | 122.000.000 | 2 Unit | 125.000.000 | 2 Unit | 125.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 23.000.000 | 1 Unit | 24.000.000 | 1 Unit | 26.000.000 | 1 Unit | 28.000.000 | 1 Unit | 32.000.000 | 1 Unit | 32.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  | Dokumen |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran** | **100** | **100** | **557.700.000** | **100** | **568.000.000** | **100** | **593.300.000** | **100** | **607.000.000** | **100** | **622.570.000** | **100** | **622.570.000** |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | 100 Laporan | 4.500.000 | 100 Laporan | 6.000.000 | 100 Laporan | 7.500.000 | 100 Laporan | 11.000.000 | 100 Laporan | 15.000.000 | 100 Laporan | 15.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 79.200.000 | 3 Laporan | 84.500.000 | 3 Laporan | 86.100.000 | 3 Laporan | 88.000.000 | 3 Laporan | 95.000.000 | 3 Laporan | 95.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 52 Laporan | 52 Laporan | 474.000.000 | 52 Laporan | 477.500.000 | 52 Laporan | 499.700.000 | 52 Laporan | 508.000.000 | 52 Laporan | 512.570.000 | 52 Laporan | 512.570.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **3** | **31** | **01** | **2** | **09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah** | **100** | **100** | **115.100.300** | **100** | **120.038.881** | **100** | **135.614.365** | **100** | **144.308.588** | **100** | **157.805.706** | **100** | **157.805.706** |  | **Benteng** |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 58.300.000 | 1 Unit | 59.200.000 | 1 Unit | 64.800.000 | 1 Unit | 68.600.000 | 1 Unit | 72.930.000 | 1 Unit | 72.930.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 15.000.000 | 10 Unit | 16.500.000 | 10 Unit | 20.514.000 | 10 Unit | 22.000.000 | 10 Unit | 25.000.000 | 10 Unit | 25.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak berwujud yang Dipelihara | Unit | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 41.800.300 | 2 Unit | 44.338.881 | 2 Unit | 50.300.365 | 2 Unit | 53.708.588 | 2 Unit | 59.875.706 | 2 Unit | 59.875.706 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  | Unit |  |  |  |
| (2) | Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,74 | 12,61 |  | 13,50 |  | 14,00 |  | 15,00 |  | 15,50 |  | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase koperasi aktif |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,42 | 85,5 |  | 88,00 |  | 91,50 |  | 94,00 |  | 96,00 |  | 96,00 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase UKM non BPR/LKM aktif |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase BPR/LKM aktif |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase Usaha Mikro dan Kecil |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Usaha mikro menjadi wirausaha |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.331 UMK | 3,331 UMK |  | 3.331 UMK |  | 3.331 UMK |  | 3.331 UMK |  | 3.331 UMK |  | 3.331 UMK |  |  |  |
|  |  |  | Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **04** |  |  |  | **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (1)** | **Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat** | **100,00** | **100,00** | **125.000.000** | **100,00** | **126.711.250** | **100,00** | **129.882.833** | **100,00** | **132.998.722** | **100,00** | **136.172.071** | **100,00** | **136.172.071** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **04** | **2** | **01** |  | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi** | **10 Koperasi** | **10 Koperasi** | **125.000.000** | **10 Koperasi** | **126.711.250** | **10 Koperasi** | **129.882.833** | **10 Koperasi** | **132.998.722** | **10 Koperasi** | **136.172.071** | **10 Koperasi** | **136.172.071** |  | Benteng |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 04 | 2 | 01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 2 Unit Usaha | 2 Unit Usaha | 35.000.000 | 2 Unit Usaha | 36.000.000 | 2 Unit Usaha | 37.000.000 | 2 Unit Usaha | 39.000.000 | 2 Unit Usaha | 40.000.000 | 2 Unit Usaha | 40.000.000 |  | Benteng |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 04 | 2 | 01 | 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 90.000.000 | 30 Unit Usaha | 90.711.250 | 30 Unit Usaha | 92.882.833 | 30 Unit Usaha | 93.998.722 | 30 Unit Usaha | 96.172.071 | 30 Unit Usaha | 96.172.071 |  | Benteng |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **06** |  |  |  | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (2)** | **Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan(%)** | **100,00** | **100,00** | **185.000.000** | **100,00** | **187.532.650** | **100,00** | **192.226.592** | **100,00** | **196.838.108** | **100,00** | **201.534.665** | **100,00** | **201.534.665** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **06** | **2** | **01** |  | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Koperasi Sehat** | **6 Koperasi** | **6 Koperasi** | **185.000.000** | **6 Koperasi** | **187.532.650** | **6 Koperasi** | **192.226.592** | **6 Koperasi** | **196.838.108** | **6 Koperasi** | **201.534.665** | **6 Koperasi** | **201.534.665** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 06 | 2 | 01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 6 Org | 6 Org | 185.000.000 | 6 Org | 187.532.650 | 6 Org | 192.226.592 | 6 Org | 196.838.108 | 6 Org | 201.534.665 | 6 Org | 201.534.665 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **07** |  |  |  | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2)** | **Persentase UMKM yang Diberdayakan** | **50,00** | **50,00** | **370.000.000** | **50,00** | **368.214.000** | **50,00** | **378.187.296** | **50,00** | **386.897.660** | **50,00** | **395.879.298** | **50,00** | **395.879.298** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **07** | **2** | **01** |  | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **Jumlah UMKM yang naik kelas** | **30 UMKM** | **30 UMKM** | **370.000.000** | **30 UMKM** | **368.214.000** | **30 UMKM** | **378.187.296** | **30 UMKM** | **386.897.660** | **30 UMKM** | **395.879.298** | **30 UMKM** | **395.879.298** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2 | 01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 100.000.000 | 30 Unit Usaha | 98.214.000 | 30 Unit Usaha | 101.187.296 | 30 Unit Usaha | 102.897.660 | 30 Unit Usaha | 105.879.298 | 30 Unit Usaha | 105.879.298 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2 | 01 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 150.000.000 | 30 Unit Usaha | 150.000.000 | 30 Unit Usaha | 152.000.000 | 30 Unit Usaha | 156.000.000 | 30 Unit Usaha | 159.000.000 | 30 Unit Usaha | 159.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2 | 01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 3 Unit Usaha | 3 Unit Usaha | 120.000.000 | 3 Unit Usaha | 120.000.000 | 3 Unit Usaha | 125.000.000 | 3 Unit Usaha | 128.000.000 | 3 Unit Usaha | 131.000.000 | 3 Unit Usaha | 131.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **08** |  |  |  | **Program Pengembangan UMKM (1)** | **Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)** | **50,00** | **50,00** | **237.500.000** | **50,00** | **240.751.375** | **50,00** | **246.777.382** | **50,00** | **252.697.571** | **50,00** | **258.726.936** | **50,00** | **258.726.936** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **08** | **2** | **01** |  | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil** | **Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)** | **30 Usaha Mikro** | **30 Usaha Mikro** | **237.500.000** | **30 Usaha Mikro** | **240.751.375** | **30 Usaha Mikro** | **246.777.382** | **30 Usaha Mikro** | **252.697.571** | **30 Usaha Mikro** | **258.726.936** | **30 Usaha Mikro** | **258.726.936** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 08 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 37 Unit Usaha | 37 Unit Usaha | 237.500.000 | 37 Unit Usaha | 240.751.375 | 37 Unit Usaha | 246.777.382 | 37 Unit Usaha | 252.697.571 | 37 Unit Usaha | 258.726.936 | 37 Unit Usaha | 258.726.936 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **04** |  |  |  | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (1)** | **Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)** | **50,00** | **50,00** | **150.000.000** | **50,00** | **151.000.000** | **50,00** | **154.950.000** | **50,00** | **157.900.000** | **50,00** | **161.400.000** | **50,00** | **161.400.000** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **04** | **2** | **01** |  | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau** | **11 Kecamatan** | **11 Kecamatan** | **150.000.000** | **11 Kecamatan** | **151.000.000** | **11 Kecamatan** | **154.950.000** | **11 Kecamatan** | **157.900.000** | **11 Kecamatan** | **161.400.000** | **11 Kecamatan** | **161.400.000** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.400.000 | 1 Laporan | 51.500.000 | 1 Laporan | 52.700.000 | 1 Laporan | 53.900.000 | 1 Laporan | 53.900.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Sinkoronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 11 Laporan | 11 Laporan | 50.000.000 | 11 Laporan | 50.350.000 | 11 Laporan | 51.500.000 | 11 Laporan | 52.700.000 | 11 Laporan | 53.900.000 | 11 Laporan | 53.900.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.250.000 | 1 Laporan | 51.950.000 | 1 Laporan | 52.500.000 | 1 Laporan | 53.600.000 | 1 Laporan | 53.600.000 |  |  |
| (3) | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha | Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha | Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 | 2,9 |  | 2,92 |  | 2,94 |  | 2,96 |  | 2,98 |  | 2,98 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,6 | 7,88 |  | 7,9 |  | 7,92 |  | 7,94 |  | 7,96 |  | 7,96 |  |  |  |
|  |  |  | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 | 1300 |  | 1350 |  | 1400 |  | 1450 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 0,67 |  | 1,73 |  | 4,48 |  | 11,59 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem  Informasi nasional |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **04** |  |  |  | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (1)** | **Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)** | **50,00** | **50,00** | **300.000.000** | **50,00** | **305.160.500** | **50,00** | **312.628.197** | **50,00** | **320.895.398** | **50,00** | **328.819.456** | **50,00** | **328.819.456** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **04** | **2** | **02** |  | **Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan** | **1 Kabupaten** | **1 Kabupaten** | **265.000.000** | **1 Kabupaten** | **269.710.500** | **1 Kabupaten** | **275.278.197** | **1 Kabupaten** | **281.000.000** | **1 Kabupaten** | **285.000.000** | **1 Kabupaten** | **285.000.000** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 02 | 01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 115.000.000 | 1 Laporan | 117.000.000 | 1 Laporan | 120.828.197 | 1 Laporan | 123.900.000 | 1 Laporan | 124.100.000 | 1 Laporan | 124.100.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritas dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 102.460.000 | 1 Laporan | 103.250.000 | 1 Laporan | 104.700.000 | 1 Laporan | 106.900.000 | 1 Laporan | 106.900.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.250.500 | 1 Laporan | 51.200.000 | 1 Laporan | 52.400.000 | 1 Laporan | 54.000.000 | 1 Laporan | 54.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **04** | **2** | **03** |  | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah jenis pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawali penggunaannya** | **4 Jenis** | **4 Jenis** | **35.000.000** | **4 Jenis** | **35.450.000** | **4 Jenis** | **37.350.000** | **4 Jenis** | **39.895.398** | **4 Jenis** | **43.819.456** | **4 Jenis** | **43.819.456** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 03 | 01 | Pemeriksaan kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.000.000 | 7 Dokumen | 15.150.000 | 7 Dokumen | 16.500.000 | 7 Dokumen | 17.000.000 | 7 Dokumen | 19.000.000 | 7 Dokumen | 19.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 03 | 02 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsudi | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 10.100.000 | 1 Laporan | 10.350.000 | 1 Laporan | 11.895.398 | 1 Laporan | 12.819.456 | 1 Laporan | 12.819.456 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 04 | 2 | 03 | 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 1 laporan | 1 laporan | 10.000.000 | 1 laporan | 10.200.000 | 1 laporan | 10.500.000 | 1 laporan | 11.000.000 | 1 laporan | 12.000.000 | 1 laporan | 12.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **02** |  |  |  | **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (2)** | **Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam** | **100,00** | **100,00** | **-** | **100,00** | **10.000.000** | **100,00** | **10.250.300** | **100,00** | **10.496.205** | **100,00** | **10.746.644** | **100,00** | **10.746.644** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **02** | **2** | **01** |  | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha** | **2 Koperasi** | **0** | - | **2 Koperasi** | **5.000.000** | **2 Koperasi** | **5.125.150** | **2 Koperasi** | **5.248.103** | **2 Koperasi** | **5.373.322** | **2 Koperasi** | **5.373.322** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 02 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | - | 1 Unit Usaha | 5.000.000 | 1 Unit Usaha | 5.125.150 | 1 Unit Usaha | 5.248.103 | 1 Unit Usaha | 5.373.322 | 1 Unit Usaha | 5.373.322 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **02** | **2** | **02** |  | **Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah koperasi simpan pinjam yang berRAT** | **0** | **0** | - | **1 Koperasi** | **5.000.000** | **1 Koperasi** | **5.125.150** | **1 Koperasi** | **5.248.102** | **1 Koperasi** | **5.373.322** | **1 Koperasi** | **5.373.322** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **02** | **2** | **02** | **01** | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | **0** | **0** | - | 1 Unit Usaha | 5.000.000 | 1 Unit Usaha | 5.125.150 | 1 Unit Usaha | 5.248.102 | 1 Unit Usaha | 5.373.322 | 1 Unit Usaha | 5.373.322 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **03** |  |  |  | **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (2)** | **Persentase koperasi sehat** | **100,00** | **100,00** | **120.000.000** | **100,00** | **121.642.800** | **100,00** | **124.687.519** | **100,00** | **127.678.773** | **100,00** | **130.725.188** | **100,00** | **130.725.188** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **03** | **2** | **01** |  | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Koperasi percontohan** | **3 Koperasi** | **3 Koperasi** | **120.000.000** | **3 Koperasi** | **121.642.800** | **3 Koperasi** | **124.687.519** | **3 Koperasi** | **127.678.773** | **3 Koperasi** | **130.725.188** | **3 Koperasi** | **130.725.188** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 03 | 2 | 01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandiran, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 162 Unit Usaha | 162 Unit Usaha | 70.000.000 | 162 Unit Usaha | 70.642.800 | 162 Unit Usaha | 72.687.519 | 162 Unit Usaha | 73.678.773 | 162 Unit Usaha | 74.725.188 | 162Unit Usaha | 74.725.188 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 03 | 2 | 01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenanga Kabupaten/Kota Kinerja | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 50.000.000 | 30 Unit Usaha | 51.000.000 | 30 Unit Usaha | 52.000.000 | 30 Unit Usaha | 54.000.000 | 30 Unit Usaha | 56.000.000 | 30 Unit Usaha | 56.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **05** |  |  |  | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (1)** | **Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan (%)** | **50,00** | **50,00** | **85.000.000** | **50,00** | **86.163.650** | **50,00** | **88.320.326** | **50,00** | **90.439.131** | **50,00** | **92.597.009** | **50,00** | **92.597.009** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **05** | **2** | **01** |  | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian** | **30 Koperasi** | **30 Koperasi** | **85.000.000** | **30 Koperasi** | **86.163.650** | **35 koperasi** | **88.320.326** | **40 koperasi** | **90.439.131** | **40 koperasi** | **92.597.009** | **40 koperasi** | **92.597.009** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 05 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 50 Orang | 60 Orang | 85.000.000 | 60 Orang | 86.163.650 | 60 Orang | 88.320.326 | 60 Orang | 90.439.131 | 60 Orang | 92.597.009 | 60 Orang | 92.597.009 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **08** |  |  |  | **Program Pengembangan UMKM (1)** | **Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)** | **50,00** | **50,00** | **237.500.000** | **50,00** | **240.751.375** | **50,00** | **246.777.382** | **50,00** | **252.697.572** | **50,00** | **258.726.935** | **50,00** | **258.726.935** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **08** | **2** | **01** |  | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil** | **Jumlah UMKM yang ditingkatkan skala usahanya menjadi usaha kecil** | **50 UMK** | **50 UMK** | **237.500.000** | **50 UMK** | **240.751.375** | **50 UMK** | **246.777.382** | **50 UMK** | **252.697.572** | **50 UMK** | **258.726.935** | **50 UMK** | **258.726.935** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 08 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 37 Unit Usaha | 37 Unit Usaha | 237.500.000 | 37 Unit Usaha | 240.751.375 | 37 Unit Usaha | 246.777.382 | 37 Unit Usaha | 252.697.572 | 37 Unit Usaha | 258.726.935 | 37 Unit Usaha | 258.726.935 |  |  |
| (4) | Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal | Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase kinerja realisasi pupuk |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,12 | 12,04 |  | 13,12 |  | 14,31 |  | 15,59 |  | 17 |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  | Persentase produk lokal yang dipasarkan |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Cakupan bina kelompok pengrajin |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 109 |  | 116 |  | 122 |  | 129 |  | 136 |  | 136 |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** |  |  |  | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (4)** | **Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan (%)** | **100** | **100** | **100.000.000** | **100** | **101.369.000** | **100** | **103.906.266** | **100** | **106.398.977** | **100** | **108.937.657** | **100** | **108.937.657** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **01** |  | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | **Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan** | **200 izin** | **200 izin** | **100.000.000** | **200 izin** | **101.369.000** | **200 izin** | **103.906.266** | **200 izin** | **106.398.977** | **200 izin** | **108.937.657** | **200 izin** | **108.937.657** |  | Selayar |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100.000.000 | 250 Dokumen | 101.369.000 | 250 Dokumen | 103.906.266 | 250 Dokumen | 106.398.977 | 250 Dokumen | 108.937.657 | 250 Dokumen | 108.937.657 |  | Selayar |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **02** |  | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 02 | 01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **03** |  | **Penerbitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 03 | 01 | Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan waralaba (STPW) dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 03 | 02 | Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **04** |  | **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 04 | 01 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 04 | 02 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **05** |  | **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 05 | 01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **06** |  | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 06 | 01 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 06 | 02 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 06 | 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **02** | **2** | **07** |  | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 02 | 2 | 07 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **03** |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (1)** | **Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)** | **100** | **100** | **150.000.000** | **100** | **152.053.500** | **100** | **155.859.399** | **100** | **159.598.466** | **100** | **163.406.485** | **100** | **163.406.485** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **03** | **2** | **01** |  | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Jumlah saran dan prasarana dalam kondisi baik** | **30 sarana** | **30 sarana** | **90.000.000** | **30 sarana** | **90.903.500** | **30 sarana** | **93.559.399** | **30 sarana** | **95.598.466** | **30 sarana** | **97.000.485** | **30 sarana** | **97.000.485** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 03 | 2 | 01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000 | 1 Unit | 40.253.500 | 1 Unit | 42.059.399 | 1 Unit | 43.098.466 | 1 Unit | 44.200.000 | 1 Unit | 44.200.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 03 | 2 | 01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000 | 2 Unit | 50.650.000 | 2 Unit | 51.500.000 | 2 Unit | 52.500.000 | 2 Unit | 52.800.485 | 2 Unit | 52.800.485 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **03** | **2** | **02** |  | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan** | **30 sarana** | **30 sarana** | **60.000.000** | **30 sarana** | **61.150.000** | **30 sarana** | **62.300.000** | **30 sarana** | **64.000.000** | **30 sarana** | **66.406.000** | **30 sarana** | **66.406.000** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000 | 1 Dokumen | 35.150.000 | 1 Dokumen | 35.300.000 | 1 Dokumen | 36.000.000 | 1 Dokumen | 37.206.000 | 1 Dokumen | 37.206.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 03 | 2 | 02 | 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000 | 1 Dokumen | 26.000.000 | 1 Dokumen | 27.000.000 | 1 Dokumen | 28.000.000 | 1 Dokumen | 29.200.000 | 1 Dokumen | 29.200.000 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **05** |  |  |  | **Program Pengembangan Ekspor (2)** | **Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)** | **15** | **17** | **180.000.000** | **19** | **182.464.200** | **21** | **187.031.279** | **23** | **191.518.159** | **25** | **196.087.783** | **25** | **196.087.783** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **05** | **2** | **01** |  | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan** | **15 Jenis** | **15 Jenis** | **180.000.000** | **15 Jenis** | **182.464.200** | **15 Jenis** | **187.031.279** | **15 Jenis** | **191.518.159** | **15 Jenis** | **196.087.783** | **15 Jenis** | **196.087.783** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 6 Pelaku Usaha | 6 Pelaku Usaha | 25.000.000 | 6 Pelaku Usaha | 26.000.000 | 6 Pelaku Usaha | 27.100.000 | 6 Pelaku Usaha | 27.268.159 | 6 Pelaku Usaha | 27.587.783 | 6 Pelaku Usaha | 27.587.783 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | 02 | Pameran dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 30.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 30.614.200 | 2 Pelaku Usaha | 31.200.000 | 2 Pelaku Usaha | 32.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 33.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 33.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 25.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 25.200.000 | 2 Pelaku Usaha | 25.850.000 | 2 Pelaku Usaha | 26.750.000 | 2 Pelaku Usaha | 27.500.000 | 2 Pelaku Usaha | 27.500.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | 04 | Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 50.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 50.250.000 | 2 Pelaku Usaha | 51.181.279 | 2 Pelaku Usaha | 52.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 53.000.000 | 2 Pelaku Usaha | 53.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | 05 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | 6 Produk | 6 Produk | 25.000.000 | 6 Produk | 25.200.000 | 6 Produk | 25.850.000 | 6 Produk | 26.750.000 | 6 Produk | 27.500.000 | 6 Produk | 27.500.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | 6 Pelaku Usaha | 6 Pelaku Usaha | 25.000.000 | 6 Pelaku Usaha | 25.200.000 | 6 Pelaku Usaha | 25.850.000 | 6 Pelaku Usaha | 26.750.000 | 6 Pelaku Usaha | 27.500.000 | 6 Pelaku Usaha | 27.500.000 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **06** |  |  |  | **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (2)** | **Persentase alat ukur yang ditera (%)** | **10,00** | **10,00** | **420.000.000** | **10,00** | **425.749.800** | **10,00** | **436.406.317** | **10,00** | **446.875.705** | **10,00** | **457.538.159** | **10,00** | **457.538.159** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **06** | **2** | **01** |  | **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku** | **50** | **60** | **420.000.000** | **70** | **425.749.800** | **80** | **436.406.317** | **90** | **446.875.705** | **100** | **457.538.159** | **100** | **457.538.159** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 06 | 2 | 01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 650 Unit | 650 Unit | 160.000.000 |  | 162.249.800 | 650 Unit | 166.406.317 | 650 Unit | 168.875.705 | 650 Unit | 172.538.159 | 650 Unit | 172.538.159 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 06 | 2 | 01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 231 Oarang | 231 Oarang | 200.000.000 | 231 Oarang | 202.000.000 | 231 Oarang | 206.000.000 | 231 Oarang | 211.000.000 | 231 Oarang | 214.000.000 | 231 Oarang | 214.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 06 | 2 | 01 | 03 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | 1500 Unit | 1500 Unit | 60.000.000 | 1500 Unit | 61.500.000 | 1500 Unit | 64.000.000 | 1500 Unit | 67.000.000 | 1500 Unit | 71.000.000 | 1500 Unit | 71.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **07** |  |  |  | **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri (2)** | **Persentase produk lokal yang dipasarkan (%)** | **25,00** | **28,00** | **100.000.000** | **33,00** | **101.369.000** | **37,00** | **103.906.266** | **39,00** | **106.398.977** | **42,00** | **108.937.657** | **42,00** | **108.937.657** |  |  |
|  |  |  |  | **3** | **30** | **07** | **2** | **01** |  | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri** | **Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri** | **5 Media** | **5 Media** | **100.000.000** | **5 Media** | **101.369.000** | **5 Media** | **103.906.266** | **5 Media** | **106.398.977** | **5 Media** | **108.937.657** | **5 Media** | **108.937.657** |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 07 | 2 | 01 | 01 | Pelaksaaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 100 UMKM | 100 UMKM | 15.000.000 | 100 UMKM | 15.519.000 | 100 UMKM | 16.906.266 | 100 UMKM | 17.198.977 | 100 UMKM | 18.000.000 | 100 UMKM | 18.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 07 | 2 | 01 | 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace*, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 100 UMKM | 100 UMKM | 15.000.000 | 100 UMKM | 15.500.000 | 100 UMKM | 16.000.000 | 100 UMKM | 17.200.000 | 100 UMKM | 17.937.657 | 100 UMKM | 17.937.657 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 30 | 07 | 2 | 01 | 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.000.000 | 1 Dokumen | 70.350.000 | 1 Dokumen | 71.000.000 | 1 Dokumen | 72.000.000 | 1 Dokumen | 73.000.000 | 1 Dokumen | 73.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **05** |  |  |  | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (1)** | **Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan (%)** | **50,00** | **50,00** | **85.000.000** | **50,00** | **86.163.650** | **50,00** | **88.320.326** | **50,00** | **90.439.131** | **50,00** | **92.597.008** | **50,00** | **92.597.008** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **05** | **2** | **01** |  | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan** | **60 Koperasi** | **60 Koperasi** | **85.000.000** | **60 Koperasi** | **86.163.650** | **60 Koperasi** | **88.320.326** | **60 Koperasi** | **90.439.131** | **60 Koperasi** | **92.597.008** | **60 Koperasi** | **92.597.008** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 05 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 40 Orang | 40 Orang | 85.000.000 | 40 Orang | 86.163.650 | 40 Orang | 88.320.326 | 40 Orang | 90.439.131 | 40 Orang | 92.597.008 | 40 Orang | 92.597.008 |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **07** |  |  |  | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2)** | **Persentase UMKM yang Diberdayakan (%)** | **50,00** | **50,00** | **230.000.000** | **50,00** | **230.000.000** | **50,00** | **235.000.000** | **50,00** | **241.000.000** | **50,00** | **247.000.000** | **50,00** | **247.000.000** |  |  |
|  |  |  |  | **2** | **17** | **07** | **2** | **01** |  | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan** | **150 UMKM** | **150 UMKM** | **230.000.000** | **150 UMKM** | **230.000.000** | **150 UMKM** | **235.000.000** | **150 UMKM** | **241.000.000** | **150 UMKM** | **247.000.000** | **150 UMKM** | **247.000.000** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2 | 01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 200 Unit Usaha | 200 Unit Usaha | 80.000.000 | 200 Unit Usaha | 80.000.000 | 200 Unit Usaha | 83.000.000 | 200 Unit Usaha | 86.000.000 | 200 Unit Usaha | 89.000.000 | 200 Unit Usaha | 89.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 17 | 07 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 150 Orang | 150 Orang | 150.000.000 | 150 Orang | 150.000.000 | 150 Orang | 152.000.000 | 150 Orang | 155.000.000 | 150 Orang | 158.000.000 | 150 Orang | 158.000.000 |  |  |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | | | |  | **9.363.450.000** | | **9.491.635.631** | | **9.780.462.769** | | **10.015.096.102** | | **10.307.789.485** | | **10.307.789.485** | |  |  |

**(Tabel 6.3.2) Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ( Berdasarkan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** |  |
| **Tahun-1 (2022)** | | **Tahun-2 (2023)** | | **Tahun-3 (2024)** | | **Tahun-4 (2025)** | | **Tahun-5 (2026)** | |  |
| **(6)** | **(7)** | | **(8)** | | **(9)** | | **(10)** | | **(11)** | | **(12)** | |  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **K** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp** | **(13)** |  |
| Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha |  |  |  | Cakupan kemandirian pelaku usaha | 9,94 | 11,17 |  | 12,75 |  | 13,98 |  | 15,21 |  | 16,43 |  | 16,43 |  |  |  |
|  | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha |  |  | Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 17,39 | 18,84 |  | 21,01 |  | 22,46 |  | 23,91 |  | 25,36 |  | 25,36 |  |  |  |
|  |  | Persentase Kemandirian UMK | 2,50 | 3,50 |  | 4,50 |  | 5,50 |  | 6,50 |  | 7,50 |  | 7,50 |  |  |  |
|  |  | 2,17,02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam | 100 | 100 | 0 | 100 | 10,000,000 | 100 | 10,250,300 | 100 | 10,496,205 | 100 | 10,746,644 | 100 | 41,493,149 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha | 2 | 2 | 0 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,125,150 | 2 | 5,248,103 | 2 | 5,373,322 | 2 | 20,746,575 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,125,150 | 1 | 5,248,103 | 1 | 5,373,322 | 4 | 20,746,575 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan Izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas. | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,125,150 | 1 | 5,248,102 | 1 | 5,373,322 | 1 | 20,746,574 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.02.2.02.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,125,150 | 1 | 5,248,102 | 1 | 5,373,322 | 4 | 20,746,574 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2,17,03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi sehat | 100 | 100 | 120,000,000 | 100 | 121,642,800 | 100 | 124,687,519 | 100 | 127,678,773 | 100 | 130,725,188 | 100 | 624,734,280 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi | 3 | 3 | 120,000,000 | 3 | 121,642,800 | 3 | 124,687,519 | 3 | 127,678,773 | 3 | 130,725,188 | 3 | 624,734,280 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 162 | 162 | 70,000,000 | 162 | 70,642,800 | 162 | 72,687,519 | 162 | 73,678,773 | 162 | 74,725,188 | 810 | 361,734,280 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja (Unit Usaha) | 30 | 30 | 50,000,000 | 30 | 51,000,000 | 30 | 52,000,000 | 30 | 54,000,000 | 30 | 56,000,000 | 150 | 263,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2,17,04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi KSP/USP yang sehat | 100 | 100 | 125,000,000 | 100 | 126,711,250 | 100 | 129,882,833 | 100 | 132,998,722 | 100 | 136,172,071 | 100 | 650,764,876 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi | 10 | 10 | 125,000,000 | 10 | 126,711,250 | 10 | 129,882,833 | 10 | 132,998,722 | 10 | 136,172,071 | 10 | 650,764,876 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 2 | 2 | 35,000,000 | 2 | 36,000,000 | 2 | 37,000,000 | 2 | 39,000,000 | 2 | 40,000,000 | 10 | 187,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.04.2.01.02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan (Unit Usaha) | 30 | 30 | 90,000,000 | 30 | 90,711,250 | 30 | 92,882,833 | 30 | 93,998,722 | 30 | 96,172,071 | 150 | 463,764,876 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2,17,05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan | 100 | 100 | 170,000,000 | 100 | 172,327,300 | 100 | 176,640,652 | 100 | 180,878,262 | 100 | 185,194,017 | 100 | 885,040,231 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 60 | 60 | 170,000,000 | 60 | 172,327,300 | 60 | 176,640,652 | 60 | 180,878,262 | 60 | 185,194,017 | 60 | 885,040,231 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 90 | 100 | 170,000,000 | 100 | 172,327,300 | 100 | 176,640,652 | 100 | 180,878,262 | 100 | 185,194,017 | 500 | 885,040,231 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2,17,06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan | 100 | 100 | 185,000,000 | 100 | 187,532,650 | 100 | 192,226,592 | 100 | 196,838,108 | 100 | 201,534,665 | 100 | 963,132,015 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Sehat | 6 | 6 | 185,000,000 | 6 | 187,532,650 | 6 | 192,226,592 | 6 | 196,838,108 | 6 | 201,534,665 | 6 | 963,132,015 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang) | 6 | 6 | 185,000,000 | 6 | 187,532,650 | 6 | 192,226,592 | 6 | 196,838,108 | 6 | 201,534,665 | 30 | 963,132,015 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2,17,07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | 100 | 100 | 600,000,000 | 100 | 598,214,000 | 100 | 613,187,296 | 100 | 627,897,660 | 100 | 642,879,298 | 100 | 3,082,178,254 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang naik kelas | 30 | 30 | 600,000,000 | 30 | 598,214,000 | 30 | 613,187,296 | 30 | 627,897,660 | 30 | 642,879,298 | 30 | 3,082,178,254 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 30 | 30 | 100,000,000 | 30 | 98,214,000 | 30 | 101,187,296 | 30 | 102,897,660 | 30 | 105,879,298 | 150 | 508,178,254 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 30 | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | 30 | 152,000,000 | 30 | 156,000,000 | 30 | 159,000,000 | 150 | 767,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah MendapatkanPerizinan (Unit Usaha) | 200 | 200 | 80,000,000 | 200 | 80,000,000 | 200 | 83,000,000 | 200 | 86,000,000 | 200 | 89,000,000 | 1000 | 418,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro (Unit Usaha) | 3 | 3 | 120,000,000 | 3 | 120,000,000 | 3 | 125,000,000 | 3 | 128,000,000 | 3 | 131,000,000 | 15 | 624,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 150 | 150 | 150,000,000 | 150 | 150,000,000 | 150 | 152,000,000 | 150 | 155,000,000 | 150 | 158,000,000 | 750 | 765,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2,17,08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya | 100 | 100 | 475,000,000 | 100 | 481,502,750 | 100 | 493,554,764 | 100 | 505,395,143 | 100 | 517,453,871 | 100 | 2,472,906,528 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT) | 30 | 30 | 475,000,000 | 30 | 481,502,750 | 30 | 493,554,764 | 30 | 505,395,143 | 30 | 517,453,871 | 30 | 2,472,906,528 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 74 | 74 | 475,000,000 | 74 | 481,502,750 | 74 | 493,554,764 | 74 | 505,395,143 | 74 | 517,453,871 | 370 | 2,472,906,528 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
| Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah |  |  |  | Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah | 62 (B) | 66 (B) |  | 70 (B) |  | 74 (B) |  | 78 (B) |  | 82 (B) |  | 82 (B) |  |  |  |
|  | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah |  |  | Nilai SAKIP perangkat daerah | 60 (B) | 65 (B) |  | 70 (BB) |  | 75 (BB) |  | 80 (A) |  | 80 (A) |  | 80 (A) |  |  |  |
|  |  | Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  |  |  |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 78 (B) | 80 (B) |  | 82 (B) |  | 84 (B) |  | 86 (B) |  | 88 (B) |  | 88 (B) |  |  |  |
|  |  | 3,30,01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.53 | 5,189,923,872 | 71.51 | 5,405,318,095 | 72.31 | 5,644,329,596 | 72.31 | 16,239,571,563 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
| Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 0 | 0 |  | 0 |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  |  | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 156,000,000 | 100 | 183,000,000 | 100 | 207,000,000 | 100 | 546,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,000,000 | 3 | 40,000,000 | 3 | 45,000,000 | 9 | 120,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000,000 | 1 | 17,000,000 | 1 | 20,000,000 | 3 | 52,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000,000 | 1 | 17,000,000 | 1 | 20,000,000 | 3 | 52,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 1 | 13,000,000 | 1 | 16,000,000 | 3 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 1 | 13,000,000 | 1 | 16,000,000 | 3 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30,000,000 | 4 | 35,000,000 | 4 | 40,000,000 | 12 | 105,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41,000,000 | 13 | 48,000,000 | 13 | 50,000,000 | 39 | 139,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3,153,709,507 | 100 | 3,259,909,507 | 100 | 3,368,109,507 | 100 | 9,781,728,521 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,118,409,507 | 39 | 3,218,409,507 | 39 | 3,318,409,507 | 117 | 9,655,228,521 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,300,000 | 1 | 17,500,000 | 1 | 20,700,000 | 3 | 53,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11,000,000 | 12 | 13,000,000 | 12 | 15,000,000 | 36 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,000,000 | 12 | 11,000,000 | 12 | 14,000,000 | 36 | 34,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11,000,000 | 100 | 13,000,000 | 100 | 15,000,000 | 100 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11,000,000 | 4 | 13,000,000 | 4 | 15,000,000 | 12 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan daerah yang tersususn | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.04.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan RetribusiDaerah (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.04.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib RetribusiDaerah (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data RetribusiDaerah (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 102,500,000 | 100 | 116,200,000 | 100 | 137,914,383 | 100 | 356,614,383 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,000,000 | 4 | 17,000,000 | 4 | 22,914,383 | 12 | 54,914,383 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 6 | 30,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,000,000 | 4 | 60,000,000 | 4 | 70,000,000 | 12 | 180,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,500,000 | 2 | 29,200,000 | 2 | 35,000,000 | 6 | 91,700,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kelancaran Administras dan Operasional Perkantoran | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 668,500,000 | 100 | 699,900,000 | 100 | 736,500,000 | 100 | 2,104,900,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200,000,000 | 70 | 211,000,000 | 70 | 215,000,000 | 210 | 626,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 70,000,000 | 90 | 72,000,000 | 94 | 75,000,000 | 271 | 217,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,000,000 | 3 | 11,000,000 | 3 | 14,500,000 | 9 | 33,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 25,000,000 | 510 | 30,000,000 | 510 | 35,000,000 | 1520 | 90,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 365,500,000 | 282 | 375,900,000 | 282 | 397,000,000 | 836 | 1,138,400,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 434,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 467,000,000 | 100 | 1,351,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,000,000 | 2 | 40,000,000 | 2 | 40,000,000 | 6 | 120,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 145,000,000 | 7 | 150,000,000 | 7 | 155,000,000 | 21 | 450,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105,000,000 | 7 | 110,000,000 | 7 | 115,000,000 | 21 | 330,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118,000,000 | 2 | 122,000,000 | 2 | 125,000,000 | 6 | 365,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,000,000 | 1 | 28,000,000 | 1 | 32,000,000 | 3 | 86,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 528,600,000 | 100 | 539,000,000 | 100 | 555,000,000 | 100 | 1,622,600,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,500,000 | 100 | 11,000,000 | 100 | 15,000,000 | 300 | 33,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86,100,000 | 3 | 88,000,000 | 3 | 95,000,000 | 9 | 269,100,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 435,000,000 | 52 | 440,000,000 | 52 | 445,000,000 | 156 | 1,320,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 135,614,365 | 100 | 144,308,588 | 100 | 157,805,706 | 100 | 437,728,659 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64,800,000 | 1 | 68,600,000 | 1 | 72,930,000 | 3 | 206,330,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,514,000 | 10 | 22,000,000 | 10 | 25,000,000 | 30 | 67,514,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,300,365 | 2 | 53,708,588 | 2 | 59,875,706 | 6 | 163,884,659 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
| Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri |  |  |  | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 7,80 | 7,88 | 3,075,000,000 | 7,91 | 3,117,096,750 | 7,92 | 8,385,041,552 | 7,94 | 8,677,086,650 | 7,96 | 8,994,162,547 | 7,96 | 32,248,387,499 |  |  |
|  | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan. |  |  | Persentase Fasilitas Perdagngan yang memenuhi standar | 50 | 56,25 | 3,075,000,000 | 62,5 | 3,117,096,750 | 68,75 | 8,385,041,552 | 75 | 8,677,086,650 | 81,25 | 8,994,162,547 | 81,25 | 32,248,387,499 |  |  |
|  |  | Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Kecukupan Komoditas Perdagangan | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 3,30,02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan | 100 | 100 | 100,000,000 | 100 | 101,369,000 | 100 | 103,906,266 | 100 | 106,398,977 | 100 | 108,937,657 | 100 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan | 200 | 200 | 100,000,000 | 200 | 101,369,000 | 200 | 103,906,266 | 200 | 106,398,977 | 200 | 108,937,657 | 200 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 250 | 250 | 100,000,000 | 250 | 101,369,000 | 249 | 103,906,266 | 249 | 106,398,977 | 250 | 108,937,657 | 1248 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.02.01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.03.01 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.03.02 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)Dalam Negeri (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | JUmlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.05.01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipantau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.06.01 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Hasil PemeriksaanPenyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.06.02 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.06.03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.02.2.07.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan PenerbitanSKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat KeteranganAsal (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3,30,03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan | 100 | 100 | 150,000,000 | 100 | 152,053,500 | 100 | 155,859,399 | 100 | 159,598,466 | 100 | 163,406,485 | 100 | 780,917,850 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%) | 100 | 100 | 90,000,000 | 100 | 90,903,500 | 100 | 93,559,399 | 100 | 95,598,466 | 100 | 97,000,485 | 100 | 467,061,850 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 1 | 1 | 40,000,000 | 1 | 40,253,500 | 1 | 42,059,399 | 1 | 43,098,466 | 1 | 44,200,000 | 5 | 209,611,365 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan (Unit) | 2 | 2 | 50,000,000 | 2 | 50,650,000 | 2 | 51,500,000 | 2 | 52,500,000 | 2 | 52,800,485 | 10 | 257,450,485 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.03.2.02 | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan | 30 | 30 | 60,000,000 | 30 | 61,150,000 | 30 | 62,300,000 | 30 | 64,000,000 | 30 | 66,406,000 | 30 | 313,856,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | 1 | 1 | 35,000,000 | 1 | 35,150,000 | 1 | 35,300,000 | 1 | 36,000,000 | 1 | 37,206,000 | 5 | 178,656,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.03.2.02.02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | 1 | 1 | 25,000,000 | 1 | 26,000,000 | 1 | 27,000,000 | 1 | 28,000,000 | 1 | 29,200,000 | 5 | 135,200,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3,30,04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase jenis komoditi yang dipantau | 100 | 100 | 450,000,000 | 100 | 456,160,500 | 100 | 467,578,197 | 100 | 478,795,398 | 100 | 490,219,456 | 100 | 2,342,753,551 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau | 11 | 11 | 150,000,000 | 11 | 151,000,000 | 11 | 154,950,000 | 11 | 157,900,000 | 11 | 161,400,000 | 11 | 775,250,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat (Laporan) | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,400,000 | 1 | 51,500,000 | 1 | 52,700,000 | 1 | 53,900,000 | 5 | 258,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat (Laporan) | 11 | 11 | 50,000,000 | 11 | 50,350,000 | 11 | 51,500,000 | 11 | 52,700,000 | 11 | 53,900,000 | 55 | 258,450,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.01.03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat (Laporan) | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,250,000 | 1 | 51,950,000 | 1 | 52,500,000 | 1 | 53,600,000 | 5 | 258,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan | 1 | 1 | 265,000,000 | 1 | 269,710,500 | 1 | 275,278,197 | 1 | 281,000,000 | 1 | 285,000,000 | 1 | 1,375,988,697 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 115,000,000 | 1 | 117,000,000 | 1 | 120,828,197 | 1 | 123,900,000 | 1 | 124,100,000 | 5 | 600,828,197 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.02.02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | 1 | 1 | 100,000,000 | 1 | 102,460,000 | 1 | 103,250,000 | 1 | 104,700,000 | 1 | 106,900,000 | 5 | 517,310,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,250,500 | 1 | 51,200,000 | 1 | 52,400,000 | 1 | 54,000,000 | 5 | 257,850,500 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 4 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,450,000 | 4 | 37,350,000 | 4 | 39,895,398 | 4 | 43,819,456 | 4 | 191,514,854 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.03.01 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas DokumenPerizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan LegalitasDokumen Perizinan (Dokumen) | 7 | 7 | 15,000,000 | 7 | 15,150,000 | 7 | 16,500,000 | 7 | 17,000,000 | 7 | 19,000,000 | 35 | 82,650,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.03.02 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan PestisidaBersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi (Laporan) | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,100,000 | 1 | 10,350,000 | 1 | 11,895,398 | 1 | 12,819,456 | 5 | 55,164,854 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,200,000 | 1 | 10,500,000 | 1 | 11,000,000 | 1 | 12,000,000 | 5 | 53,700,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3,30,05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor | 100 | 100 | 180,000,000 | 100 | 182,464,200 | 100 | 187,031,279 | 100 | 191,518,159 | 100 | 196,087,783 | 100 | 937,101,421 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan | 15 | 15 | 180,000,000 | 15 | 182,464,200 | 15 | 187,031,279 | 15 | 191,518,159 | 13 | 196,087,783 | 15 | 937,101,421 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina (Pelaku Usaha) | 6 | 6 | 25,000,000 | 6 | 26,000,000 | 6 | 27,100,000 | 6 | 27,268,159 | 6 | 27,587,783 | 30 | 132,955,942 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01.02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 2 | 2 | 30,000,000 | 2 | 30,614,200 | 2 | 31,200,000 | 2 | 32,000,000 | 2 | 33,000,000 | 10 | 156,814,200 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01.03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 2 | 2 | 25,000,000 | 2 | 25,200,000 | 2 | 25,850,000 | 2 | 26,750,000 | 2 | 27,500,000 | 10 | 130,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01.04 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 2 | 2 | 50,000,000 | 2 | 50,250,000 | 2 | 51,181,279 | 2 | 52,000,000 | 2 | 53,000,000 | 10 | 256,431,279 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01.05 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yangDisusun Menjadi Materi Promosi (Produk) | 6 | 6 | 25,000,000 | 6 | 25,200,000 | 6 | 25,850,000 | 6 | 26,750,000 | 6 | 27,500,000 | 30 | 130,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.05.2.01.06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha) | 6 | 6 | 25,000,000 | 6 | 25,200,000 | 6 | 25,850,000 | 6 | 26,750,000 | 6 | 27,500,000 | 30 | 130,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3,30,06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur yang ditera | 100 | 100 | 420,000,000 | 100 | 425,749,800 | 100 | 436,406,317 | 100 | 446,875,705 | 100 | 457,538,159 | 100 | 2,186,569,981 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase alat ukur yang ditera (%) | 10 | 10 | 420,000,000 | 10 | 425,749,800 | 10 | 436,406,317 | 10 | 446,875,705 | 10 | 457,538,159 | 10 | 2,186,569,981 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 650 | 650 | 160,000,000 | 650 | 162,249,800 | 650 | 166,406,317 | 650 | 168,875,705 | 650 | 172,538,159 | 3250 | 830,069,981 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legalyang Dibina (Orang) | 231 | 231 | 200,000,000 | 231 | 202,000,000 | 231 | 206,000,000 | 231 | 211,000,000 | 231 | 214,000,000 | 1155 | 1,033,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.06.2.01.03 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit) | 1500 | 1500 | 60,000,000 | 1500 | 61,500,000 | 1500 | 64,000,000 | 1500 | 67,000,000 | 1500 | 71,000,000 | 7500 | 323,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3,30,07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase produk lokal yang dipasarkan | 25 | 28 | 100,000,000 | 33 | 101,369,000 | 37 | 103,906,266 | 39 | 106,398,977 | 42 | 108,937,657 | 42 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri | 5 | 5 | 100,000,000 | 5 | 101,369,000 | 5 | 103,906,266 | 5 | 106,398,977 | 5 | 108,937,657 | 5 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di TingkatKabupaten/Kota (UMKM) | 100 | 100 | 15,000,000 | 100 | 15,519,000 | 100 | 16,906,266 | 100 | 17,198,977 | 100 | 18,000,000 | 500 | 82,624,243 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.07.2.01.02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM) | 100 | 100 | 15,000,000 | 100 | 15,500,000 | 100 | 16,000,000 | 100 | 17,200,000 | 100 | 17,937,657 | 500 | 81,637,657 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
|  |  | 3.30.07.2.01.03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen) | 1 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,350,000 | 1 | 71,000,000 | 1 | 72,000,000 | 1 | 73,000,000 | 5 | 356,350,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
| **Total** | | | | | | | **3,075,000,000** |  | **3,117,096,750** |  | **8,385,041,552** |  | **8,677,086,650** |  | **8,994,162,547** |  | **32,248,387,499** |  |  |

**Tabel 6.3.3) Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahum 2023 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** |
| **Tahun-1 (2022)** | | **Tahun-2 (2023)** | | **Tahun-3 (2024)** | | **Tahun-4 (2025)** | | **Tahun-5 (2026)** | |
| **(6)** | **(7)** | | **(8)** | | **(9)** | | **(10)** | | **(11)** | | **(12)** | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **K** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp** | **(13)** |
| Meningkatkan kemandirian Pelaku usaha |  |  |  | Cakupan kemandirian pelaku usaha | 9,94 |  |  |  |  | 13,98 |  | 15,21 |  | 16,43 |  | 16,43 |  |  |
|  | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha |  |  | Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 17,39 |  |  |  |  | 22,46 |  | 23,91 |  | 25,36 |  | 25,36 |  |  |
|  |  | Persentase Kemandirian UMK | 2,50 |  |  |  |  | 5,50 |  | 6,50 |  | 7,50 |  | 7,50 |  |  |
|  |  | 2,17,02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam | 100 |  |  |  |  | 100 | 10,250,300 | 100 | 10,496,205 | 100 | 10,746,644 | 100 | 41,493,149 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha | 2 |  |  |  |  | 2 | 5,125,150 | 2 | 5,248,103 | 2 | 5,373,322 | 2 | 20,746,575 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 1 | 5,125,150 | 1 | 5,248,103 | 1 | 5,373,322 | 4 | 20,746,575 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan Izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas. | 1 |  |  |  |  | 1 | 5,125,150 | 1 | 5,248,102 | 1 | 5,373,322 | 1 | 20,746,574 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 1 | 5,125,150 | 1 | 5,248,102 | 1 | 5,373,322 | 4 | 20,746,574 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2,17,03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi sehat | 100 |  |  |  |  | 100 | 124,687,519 | 100 | 127,678,773 | 100 | 130,725,188 | 100 | 624,734,280 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi | 3 |  |  |  |  | 3 | 124,687,519 | 3 | 127,678,773 | 3 | 130,725,188 | 3 | 624,734,280 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Penguatan Koperasi Tata yang Dilakukan Kelola Kelembagaan Koperasi ( Unit Usaha ) | 162 |  |  |  |  | 162 | 72,687,519 | 162 | 73,678,773 | 162 | 74,725,188 | 810 | 361,734,280 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlahunit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan ( Unit Usaha ) | 30 |  |  |  |  | 30 | 52,000,000 | 30 | 54,000,000 | 30 | 56,000,000 | 150 | 263,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2,17,04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi KSP/USP yang sehat | 100 |  |  |  |  | 100 | 129,882,833 | 100 | 132,998,722 | 100 | 136,172,071 | 100 | 650,764,876 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi | 10 |  |  |  |  | 10 | 129,882,833 | 10 | 132,998,722 | 10 | 136,172,071 | 10 | 650,764,876 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 2 |  |  |  |  | 2 | 37,000,000 | 2 | 39,000,000 | 2 | 40,000,000 | 10 | 187,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko,  Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 30 |  |  |  |  | 30 | 92,882,833 | 30 | 93,998,722 | 30 | 96,172,071 | 150 | 463,764,876 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2,17,05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan | 100 |  |  |  |  | 100 | 176,640,652 | 100 | 180,878,262 | 100 | 185,194,017 | 100 | 885,040,231 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 60 |  |  |  |  | 60 | 176,640,652 | 60 | 180,878,262 | 60 | 185,194,017 | 60 | 885,040,231 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 90 |  |  |  |  | 100 | 176,640,652 | 100 | 180,878,262 | 100 | 185,194,017 | 500 | 885,040,231 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.05.2.02 | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.05.2.03 | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2,17,06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan | 100 |  |  |  |  | 100 | 192,226,592 | 100 | 196,838,108 | 100 | 201,534,665 | 100 | 963,132,015 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Sehat | 6 |  |  |  |  | 6 | 192,226,592 | 6 | 196,838,108 | 6 | 201,534,665 | 6 | 963,132,015 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 6 |  |  |  |  | 6 | 192,226,592 | 6 | 196,838,108 | 6 | 201,534,665 | 30 | 963,132,015 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi, Penataan dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.0006 | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.3.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.3.01.0003 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi, Penataan dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)\ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.06.3.01.0004 | Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi | Jumlah kelompok masyarakat pra koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi (Kelompok pra-koperasi) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2,17,07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | 100 |  |  |  |  | 100 | 613,187,296 | 100 | 627,897,660 | 100 | 642,879,298 | 100 | 3,082,178,254 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang naik kelas | 30 |  |  |  |  | 30 | 613,187,296 | 30 | 627,897,660 | 30 | 642,879,298 | 30 | 3,082,178,254 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 30 |  |  |  |  | 30 | 152,000,000 | 30 | 156,000,000 | 30 | 159,000,000 | 150 | 767,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah MendapatkanPerizinan (Unit Usaha) | 200 |  |  |  |  | 200 | 83,000,000 | 200 | 86,000,000 | 200 | 89,000,000 | 1000 | 418,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro (Unit Usaha) | 3 |  |  |  |  | 3 | 125,000,000 | 3 | 128,000,000 | 3 | 131,000,000 | 15 | 624,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 150 |  |  |  |  | 150 | 152,000,000 | 150 | 155,000,000 | 150 | 158,000,000 | 750 | 765,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan  Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0008 | Pemulihan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0010 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 0 |  |  |  |  | 30 | 44.000.000 | 30 | 45.000.000 | 30 | 46.000.000 | 30 | 217.000.000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.3.02 | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.3.02.0001 | Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM (Perdaus/Perkada) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.3.03 | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.3.03.0001 | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pelaku Usaha ) | 0 |  |  |  |  | 40 | 57.187.296 | 40 | 57.897.660 | 40 | 59.879.298 | 40 | 291.178.254 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.3.04 | Fasilitasi kemitraan usaha  melalui rantai pasok antara  usaha besar, usaha menengah,  dengan usaha kecil dan usaha  mikro untuk mempercepat  transformasi UMKM dalam  meningkatkan skala usaha. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.3.04.0001 | Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok (Unit Usaha ) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.4.02 | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.4.02.0001 | Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM (Perdaus/Perkada) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.4.03 | Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.4.03.0001 | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pelaku Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.4.04 | Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.07.4.04.0001 | Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok (Unit Usaha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2,17,08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya | 100 |  |  |  |  | 100 | 493,554,764 | 100 | 505,395,143 | 100 | 517,453,871 | 100 | 2,472,906,528 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT) | 30 |  |  |  |  | 30 | 493,554,764 | 30 | 505,395,143 | 30 | 517,453,871 | 30 | 2,472,906,528 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha ) | 30 |  |  |  |  | 30 | 493,554,764 | 30 | 505,395,143 | 30 | 517,453,871 | 30 | 2,472,906,528 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.08.2.01.0003 | Penmbuhan dan pengembangan kewirausahaan | Jumlah yang di fasilitasi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 2.17.09 | PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17.09.3.01 | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.3.01.0001 | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.3.02 | Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.3.02.0001 | Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.4.01 | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.4.01.0001 | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.4.02 | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.17.09.4.02.0001 | Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah |  |  |  | Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah | 62 (B) |  |  |  |  | 74 (B) |  | 78 (B) |  | 82 (B) |  | 82 (B) |  |  |
|  | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah |  |  | Nilai SAKIP perangkat daerah | 60 (B) |  |  |  |  | 75 (BB) |  | 80 (A) |  | 80 (A) |  | 80 (A) |  |  |
|  |  | Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai |  |  |  |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  | Sesuai |  |  |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 78 (B) |  |  |  |  | 84 (B) |  | 86 (B) |  | 88 (B) |  | 88 (B) |  |  |
|  |  | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja | 0 |  |  |  |  | 70.53 | 5,189,923,872 | 71.51 | 5,405,318,095 | 72.31 | 5,644,329,596 | 72.31 | 16,239,571,563 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 0 |  |  |  |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 95 |  |
|  |  | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun | 100 |  |  |  |  | 100 | 156,000,000 | 100 | 183,000,000 | 100 | 207,000,000 | 100 | 546,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 3 | 35,000,000 | 3 | 40,000,000 | 3 | 45,000,000 | 9 | 120,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 1 | 15,000,000 | 1 | 17,000,000 | 1 | 20,000,000 | 3 | 52,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 1 | 15,000,000 | 1 | 17,000,000 | 1 | 20,000,000 | 3 | 52,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 1 | 10,000,000 | 1 | 13,000,000 | 1 | 16,000,000 | 3 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 1 | 10,000,000 | 1 | 13,000,000 | 1 | 16,000,000 | 3 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 4 | 30,000,000 | 4 | 35,000,000 | 4 | 40,000,000 | 12 | 105,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 13 | 41,000,000 | 13 | 48,000,000 | 13 | 50,000,000 | 39 | 139,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 |  |  |  |  | 100 | 3,153,709,507 | 100 | 3,259,909,507 | 100 | 3,368,109,507 | 100 | 9,781,728,521 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 0 |  |  |  |  | 39 | 3,118,409,507 | 39 | 3,218,409,507 | 39 | 3,318,409,507 | 117 | 9,655,228,521 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 1 | 15,300,000 | 1 | 17,500,000 | 1 | 20,700,000 | 3 | 53,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 12 | 11,000,000 | 12 | 13,000,000 | 12 | 15,000,000 | 36 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 12 | 9,000,000 | 12 | 11,000,000 | 12 | 14,000,000 | 36 | 34,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun | 100 |  |  |  |  | 100 | 11,000,000 | 100 | 13,000,000 | 100 | 15,000,000 | 100 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0002 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 4 | 11,000,000 | 4 | 13,000,000 | 4 | 15,000,000 | 12 | 39,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan daerah yang tersususn | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan RetribusiDaerah (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek RetribusiDaerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib RetribusiDaerah (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data RetribusiDaerah (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 |  |  |  |  | 100 | 102,500,000 | 100 | 116,200,000 | 100 | 137,914,383 | 100 | 356,614,383 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 4 | 15,000,000 | 4 | 17,000,000 | 4 | 22,914,383 | 12 | 54,914,383 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 6 | 30,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 4 | 50,000,000 | 4 | 60,000,000 | 4 | 70,000,000 | 12 | 180,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 2 | 27,500,000 | 2 | 29,200,000 | 2 | 35,000,000 | 6 | 91,700,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kelancaran Administras dan Operasional Perkantoran | 100 |  |  |  |  | 100 | 668,500,000 | 100 | 699,900,000 | 100 | 736,500,000 | 100 | 2,104,900,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 70 | 200,000,000 | 70 | 211,000,000 | 70 | 215,000,000 | 210 | 626,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 87 | 70,000,000 | 90 | 72,000,000 | 94 | 75,000,000 | 271 | 217,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 3 | 8,000,000 | 3 | 11,000,000 | 3 | 14,500,000 | 9 | 33,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 500 | 25,000,000 | 510 | 30,000,000 | 510 | 35,000,000 | 1520 | 90,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 272 | 365,500,000 | 282 | 375,900,000 | 282 | 397,000,000 | 836 | 1,138,400,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 |  |  |  |  | 100 | 434,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 467,000,000 | 100 | 1,351,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 2 | 40,000,000 | 2 | 40,000,000 | 2 | 40,000,000 | 6 | 120,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 7 | 145,000,000 | 7 | 150,000,000 | 7 | 155,000,000 | 21 | 450,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 7 | 105,000,000 | 7 | 110,000,000 | 7 | 115,000,000 | 21 | 330,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 2 | 118,000,000 | 2 | 122,000,000 | 2 | 125,000,000 | 6 | 365,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 1 | 26,000,000 | 1 | 28,000,000 | 1 | 32,000,000 | 3 | 86,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran | 100 |  |  |  |  | 100 | 528,600,000 | 100 | 539,000,000 | 100 | 555,000,000 | 100 | 1,622,600,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 100 | 7,500,000 | 100 | 11,000,000 | 100 | 15,000,000 | 300 | 33,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 3 | 86,100,000 | 3 | 88,000,000 | 3 | 95,000,000 | 9 | 269,100,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantOR | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 52 | 435,000,000 | 52 | 440,000,000 | 52 | 445,000,000 | 156 | 1,320,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah | 100 |  |  |  |  | 100 | 135,614,365 | 100 | 144,308,588 | 100 | 157,805,706 | 100 | 437,728,659 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 0 |  |  |  |  | 1 | 64,800,000 | 1 | 68,600,000 | 1 | 72,930,000 | 3 | 206,330,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya ( Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 10 | 20,514,000 | 10 | 22,000,000 | 10 | 25,000,000 | 30 | 67,514,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 |  |  |  |  | 2 | 50,300,365 | 2 | 53,708,588 | 2 | 59,875,706 | 6 | 163,884,659 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | X.XX.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri |  |  |  | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 7,80 |  |  |  |  | 7,92 | 8,385,041,552 | 7,94 | 8,677,086,650 | 7,96 | 8,994,162,547 | 7,96 | 32,248,387,499 |  |
|  | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan. |  |  | Persentase Fasilitas Perdagngan yang memenuhi standar | 50 |  |  |  |  | 68,75 | 8,385,041,552 | 75 | 8,677,086,650 | 81,25 | 8,994,162,547 | 81,25 | 32,248,387,499 |  |
|  |  | Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |
|  |  | Kecukupan Komoditas Perdagangan | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3,30,02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan | 100 |  |  |  |  | 100 | 103,906,266 | 100 | 106,398,977 | 100 | 108,937,657 | 100 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan | 200 |  |  |  |  | 200 | 103,906,266 | 200 | 106,398,977 | 200 | 108,937,657 | 200 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 250 |  |  |  |  | 249 | 103,906,266 | 249 | 106,398,977 | 250 | 108,937,657 | 1248 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.01.0002 | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.03.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)Dalam Negeri (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.03.0003 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.03.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.04 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | JUmlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang diterbitkan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.04.0001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen ) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.04.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.04.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.04.0004 | Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | JUmlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang diterbitkan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.05.0002 | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C | Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipantau | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.06.0001 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Hasil PemeriksaanPenyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.2.07.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan PenerbitanSKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat KeteranganAsal (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.3.08 | Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bag |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.3.08.0001 | Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP | Jumlah Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.3.09 | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.30.02.3.09.0001 | Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.4.08 | Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.30.02.4.08.0001 | Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP | Jumlah Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.02.4.09 | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.30.02.4.09.0001 | Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3,30,03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan | 100 |  |  |  |  | 100 | 155,859,399 | 100 | 159,598,466 | 100 | 163,406,485 | 100 | 780,917,850 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%) | 100 |  |  |  |  | 100 | 93,559,399 | 100 | 95,598,466 | 100 | 97,000,485 | 100 | 467,061,850 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 1 |  |  |  |  | 1 | 42,059,399 | 1 | 43,098,466 | 1 | 44,200,000 | 5 | 209,611,365 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan (Unit) | 2 |  |  |  |  | 2 | 51,500,000 | 2 | 52,500,000 | 2 | 52,800,485 | 10 | 257,450,485 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.01.0003 | Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan fasilitasi sistem Resi Gudang  (Kegiatan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.01.0004 | Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota | Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.02 | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan | 30 |  |  |  |  | 30 | 62,300,000 | 30 | 64,000,000 | 30 | 66,406,000 | 30 | 313,856,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 35,300,000 | 1 | 36,000,000 | 1 | 37,206,000 | 5 | 178,656,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 27,000,000 | 1 | 28,000,000 | 1 | 29,200,000 | 5 | 135,200,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.3.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.3.01.0003 | Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.4.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.03.4.01.0003 | Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3,30,04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase jenis komoditi yang dipantau | 100 |  |  |  |  | 100 | 467,578,197 | 100 | 478,795,398 | 100 | 490,219,456 | 100 | 2,342,753,551 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau | 11 |  |  |  |  | 11 | 154,950,000 | 11 | 157,900,000 | 11 | 161,400,000 | 11 | 775,250,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 51,500,000 | 1 | 52,700,000 | 1 | 53,900,000 | 5 | 258,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat (Laporan) | 11 |  |  |  |  | 11 | 51,500,000 | 11 | 52,700,000 | 11 | 53,900,000 | 55 | 258,450,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 51,950,000 | 1 | 52,500,000 | 1 | 53,600,000 | 5 | 258,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan | 1 |  |  |  |  | 1 | 275,278,197 | 1 | 281,000,000 | 1 | 285,000,000 | 1 | 1,375,988,697 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 120,828,197 | 1 | 123,900,000 | 1 | 124,100,000 | 5 | 600,828,197 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 103,250,000 | 1 | 104,700,000 | 1 | 106,900,000 | 5 | 517,310,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 51,200,000 | 1 | 52,400,000 | 1 | 54,000,000 | 5 | 257,850,500 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 4 |  |  |  |  | 4 | 37,350,000 | 4 | 39,895,398 | 4 | 43,819,456 | 4 | 191,514,854 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas DokumenPerizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan LegalitasDokumen Perizinan (Dokumen) | 7 |  |  |  |  | 7 | 16,500,000 | 7 | 17,000,000 | 7 | 19,000,000 | 35 | 82,650,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan PestisidaBersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 10,350,000 | 1 | 11,895,398 | 1 | 12,819,456 | 5 | 55,164,854 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 10,500,000 | 1 | 11,000,000 | 1 | 12,000,000 | 5 | 53,700,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3,30,05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor | 100 |  |  |  |  | 100 | 187,031,279 | 100 | 191,518,159 | 100 | 196,087,783 | 100 | 937,101,421 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan | 15 |  |  |  |  | 15 | 187,031,279 | 15 | 191,518,159 | 13 | 196,087,783 | 15 | 937,101,421 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 2 |  |  |  |  | 2 | 45,200,000 | 2 | 45,000,000 | 2 | 33,000,000 | 10 | 156,814,200 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 2 |  |  |  |  | 2 | 35,850,000 | 2 | 36,750,000 | 2 | 37,500,000 | 10 | 140,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 2 |  |  |  |  | 2 | 66,181,279 | 2 | 67,000,000 | 2 | 543,000,000 | 10 | 271,431,279 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yangDisusun Menjadi Materi Promosi (Produk) | 6 |  |  |  |  | 6 | 25,850,000 | 6 | 36,750,000 | 6 | 37,500,000 | 30 | 140,300,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3,30,06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur yang ditera | 100 |  |  |  |  | 100 | 436,406,317 | 100 | 446,875,705 | 100 | 457,538,159 | 100 | 2,186,569,981 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase alat ukur yang ditera (%) | 10 |  |  |  |  | 10 | 436,406,317 | 10 | 446,875,705 | 10 | 457,538,159 | 10 | 2,186,569,981 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 650 |  |  |  |  | 650 | 166,406,317 | 650 | 168,875,705 | 650 | 172,538,159 | 3250 | 830,069,981 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legalyang Dibina (Orang) | 231 |  |  |  |  | 231 | 206,000,000 | 231 | 211,000,000 | 231 | 214,000,000 | 1155 | 1,033,000,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit) | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 64,000,000 | 1500 | 67,000,000 | 1500 | 71,000,000 | 7500 | 323,500,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3,30,07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase produk lokal yang dipasarkan | 25 |  |  |  |  | 37 | 103,906,266 | 39 | 106,398,977 | 42 | 108,937,657 | 42 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri | 5 |  |  |  |  | 5 | 103,906,266 | 5 | 106,398,977 | 5 | 108,937,657 | 5 | 520,611,900 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 0 |  |  |  |  | 1 | 71,000,000 | 1 | 72,000,000 | 1 | 73,000,000 | 5 | 356,350,000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 100 |  |  |  |  | 100 | 16,906,266 | 100 | 17,198,977 | 100 | 18,000,000 | 500 | 82,624,243 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|  |  | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 100 |  |  |  |  | 100 | 16,000,000 | 100 | 17,200,000 | 100 | 17,937,657 | 500 | 81,637,657 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **Total** | | | | | | |  |  |  |  | **8,385,041,552** |  | **8,677,086,650** |  | **8,994,162,547** |  | **32,248,387,499** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 6.3.4. ( SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA )** | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM DAN KEGIATAN INVESTASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Volume** | **Tahun Pelaksanaan** | | | | | **Detail Lokasi** | **Pagu Anggaran (Rp.)** | **Sumber Pendanaan** | **Keterangan** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
| 1 | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | | | | | | | | | | |
|  | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **314 pelaku UKM; 1 unit** |  |  |  |  |  | **Kec. Pasilambena; Kec. Taka Bonerate, Kec. Pasimarannu; Kec. Bontoharu, Kec. Benteng** | **700.000.000** | **DAK** | **Kelengkapan Surat Kesanggupan daerah untuk operasional, Sertifikat tanah dan gambar rencana,Desain Gedung (sksterior dan Interior )sesuai ketetapan, dimana bentuk lar tidak menghilangkan bentuk dan ciri khas dari Gedung PLUT-KUMKM, Surat Penunjukan perangkat daerah yang membiangi Koperasi dan UMKM Kab/Kota sebagai Koordinator pelaksana program PLUT-KUMKM.** |
|  | Pelatihan Pembuatan Dampok Pisang bagi Pelaku UKM | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP |
|  | Pelatihan Pengolahan Ikan bagi Pelaku UKM | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Taka Bonerate | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP |
|  | Pelatihan Pengolahan Jambu Mente menjadi Keripik Jambu Mente | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Pasimarannu | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP, sertifikat pelatihan |
|  | Pelatihan Pembuatan Buah Aren (Nila) menjadi Kolang - Kaling | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Bontoharu | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP |
|  | Sosialisasi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan KUKM di Kabupaten Kepulauan Selayar | 50 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Benteng | 100.000.000 | DAK | Data Pelaku Usaha |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pelatihan Kewirausahaan bagi Sentra UKM | 96 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Benteng | 100.000.000 | DAK | Data Potensi Produk Unggulan |
|  | Pelatihan Peningkatan SDM bagi Sentra UKM dengan Tema Bermuatan Lokal Berdaya Saing Global | 48 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Benteng | 100.000.000 | DAK | Data Potensi Produk Unggulan |
|  | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | | | | | | | | | | |
|  | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **5 Koperasi** | √ |  |  |  |  | 5 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | **Surat Mandat Koperasi** |
|  | Revitalisasi dan Aktivasi Koperasi dalam Rangka Mendukung Gerbang Sari | 5 Koperasi | √ |  |  |  |  | 5 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | **Data Kelembagaan Koperasi** |
|  | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | | | | | | | | | | |
|  | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **90 Koperasi** | √ |  |  |  |  | **9 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)** | **300.000.000** | **DAK** | **Kelengkapan Surat mandat dari Koperasi** |
|  | Pelatihan Akuntansi Dasar dan Tingkat Lanjutan | 30 Koperasi | √ |  |  |  |  | 3 Kecamatan Kepulauan | 100.000.000 | DAK | Rekomendasi Pengurus Koperasi |
|  | Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi USP dan KSP | 30 Koperasi | √ |  |  |  |  | 3 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | Rekomendasi Pengurus Koperasi |
|  | Pelatihan Perkoperasian Syariah Tingkat Dasar | 30 Koperasi | √ |  |  |  |  | 3 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | Rekomendasi dari Kementerian Departemen Agama |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 6.3.5. ( SETELAH PERUBAHAN RENSTRA )** | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM DAN KEGIATAN INVESTASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Volume** | **Tahun Pelaksanaan** | | | | | **Detail Lokasi** | **Pagu Anggaran (Rp.)** | **Sumber Pendanaan** | **Keterangan** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
| 1 | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | | | | | | | | | | |
|  | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **314 pelaku UKM; 1 unit** |  |  |  |  |  | **Kec. Pasilambena; Kec. Taka Bonerate, Kec. Pasimarannu; Kec. Bontoharu, Kec. Benteng** | **700.000.000** | **DAK** | **Kelengkapan Surat Kesanggupan daerah untuk operasional, Sertifikat tanah dan gambar rencana,Desain Gedung (sksterior dan Interior )sesuai ketetapan, dimana bentuk lar tidak menghilangkan bentuk dan ciri khas dari Gedung PLUT-KUMKM, Surat Penunjukan perangkat daerah yang membiangi Koperasi dan UMKM Kab/Kota sebagai Koordinator pelaksana program PLUT-KUMKM.** |
|  | Pelatihan Pembuatan Dampok Pisang bagi Pelaku UKM | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Pasilambena | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP |
|  | Pelatihan Pengolahan Ikan bagi Pelaku UKM | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Taka Bonerate | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP |
|  | Pelatihan Pengolahan Jambu Mente menjadi Keripik Jambu Mente | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Pasimarannu | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP, sertifikat pelatihan |
|  | Pelatihan Pembuatan Buah Aren (Nila) menjadi Kolang - Kaling | 30 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Bontoharu | 100.000.000 | DAK | Kelenkapan Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen FT,KK,KTP |
|  | Sosialisasi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan KUKM di Kabupaten Kepulauan Selayar | 50 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Benteng | 100.000.000 | DAK | Data Pelaku Usaha |
|  | Pelatihan Kewirausahaan bagi Sentra UKM | 96 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Benteng | 100.000.000 | DAK | Data Potensi Produk Unggulan |
|  | Pelatihan Peningkatan SDM bagi Sentra UKM dengan Tema Bermuatan Lokal Berdaya Saing Global | 48 pelaku UKM | √ |  |  |  |  | Kec. Benteng | 100.000.000 | DAK | Data Potensi Produk Unggulan |
|  | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | | | | | | | | | | |
|  | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **5 Koperasi** | √ |  |  |  |  | 5 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | **Surat Mandat Koperasi** |
|  | Revitalisasi dan Aktivasi Koperasi dalam Rangka Mendukung Gerbang Sari | 5 Koperasi | √ |  |  |  |  | 5 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | **Data Kelembagaan Koperasi** |
|  | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | | | | | | | | | | |
|  | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **90 Koperasi** | √ |  |  |  |  | **9 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan)** | **300.000.000** | **DAK** | **Kelengkapan Surat mandat dari Koperasi** |
|  | Pelatihan Akuntansi Dasar dan Tingkat Lanjutan | 30 Koperasi | √ |  |  |  |  | 3 Kecamatan Kepulauan | 100.000.000 | DAK | Rekomendasi Pengurus Koperasi |
|  | Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi USP dan KSP | 30 Koperasi | √ |  |  |  |  | 3 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | Rekomendasi Pengurus Koperasi |
|  | Pelatihan Perkoperasian Syariah Tingkat Dasar | 30 Koperasi | √ |  |  |  |  | 3 Kecamatan (Daratan dan Kepulauan) | 100.000.000 | DAK | Rekomendasi dari Kementerian Departemen Agama |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan RPJMD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, kinerja penyelenggaraan bidang layanan urusan wajib yakni Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan layanan urusan pilihan yakni Perdagangan.

Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas maupun program penunjang yang diamanatkan kepada OPD melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi OPD dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk lebih jelasnya tentang layanan penyelenggaraan urusan pada Dinas Perdadangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | | **Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra 2020** | **Target Kinerja pada Tahun ke-** | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | - | Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase Koperasi Sehat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Persentase pengurus koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase UMKM yang diberdayakan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase Ketersediaan sarana prasarana perdagangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase jenis komoditi yang dipantau | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase alat ukur yang ditera | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - | Persentase produk lokal yang dipasarkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten

Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Indikator | Indikator | Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 8.1 | Mempertahankan Perumbuhan Ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya , setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestic bruto pertahun di Negara kurang berkembang | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.(a) | PDB perkapita | Juta/jiwa | 46,71 | 0 | 49,83 | 53,50 | 55,00 | 57,50 | | 60,00 | |
| 8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi termasuk melalui focus pada sector yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.\* | LAju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB Riil per orang bekerja per tahun | % | 9,72 | 0 | 10,13 | 10,34 | 10,56 | 10,78 | | 11,00 | |
| 8.3 | Menggalakkan Kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | % | 51,10 | 0 | 52,68 | 53,49 | 54,32 | 55,15 | | 56,00 | |
| 8.6 | Pada tahun 2020, secara substansional mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan | | | | | | | | | | |
| 8.6.1\* | Persentase Usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | % | 20 |  | 22 | 24 | 26 | 26 | | 26 | |
| Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12.7 | Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. | | | | | | | | | | |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | |

**BAB VIII**

**P E N U T U P**

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja dalam muwujudkan peningkatan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Dan pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra akan dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng,

|  |
| --- |
| **KEPALA DINAS** |
|  |
|  |
|  |
| **ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si** |
| Pangkat : Pembina Utama Muda |
| NIP. 19670526 199703 1 005 |